

SKRIPSI

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PADA BADAN PUSAT STATISTIK PAREPARE
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**R E S K I
19.2800.049**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PADA BADAN PUSAT STATISTIK PAREPARE
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



**OLEH
R E S K I
NIM. 19.2800.049**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S.Tr.Ak) Pada Program Studi Akuntansi lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan pada Badan Pusat Statistik Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : R e s k i

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.049

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1620/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP : 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping : Saddam Husain, S.E., M.Ak.
NIP : 19910831 202012 1 009



(.....)

(.....)

Mengetahui:



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muhammad Iqbal Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan pada Badan Pusat Statistik Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : R e s k i

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.049

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1620/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Ketua)	
Saddan Husain, S.E., M.Ak.	(Sekretaris)	
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Anggota)	
Umaima, M.E.I	(Anggota)	

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710308 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Rahmawati dan Ayahanda Syafruddin yang telah membesarkanku, mendidik dan tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan dan materi, dan mengajariku arti sebuah kesabaran, kejujuran dalam hidup. Dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih pada Ibunda dan Ayahanda tercinta kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk kalian, dan semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada Ibunda dan Ayahanda.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku Pembimbing I dan Bapak Saddam Husain, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kiai Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M selaku penanggungjawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang tidak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
6. Dosen Penasehat Akademik ibu Dra. Rukiah, M.H. yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
7. Segenap Staf dan administrator Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
8. Semua teman-teman senasib dan seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, teman PPL di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare dan teman-teman KPM MANDIRI kelurahan betteng, Rampusa Kecamatan Lembang yang telah memberikan pengalaman belajar yang sangat luar biasa.
9. Bapak Suparno Pani, SE. selaku kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare serta para Staf Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan informasi sehingga mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini.

10. Untuk Muh. Rahmat Saputra, Khaerana Nasir, Rasidah, Auliya'a Citra prajasari, terima kasih atas bantuannya dalam proses penelitian ini. Dan teruntuk semua teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal.
11. Untuk saudara penulis Agustina, Apriyanto, Jamaluddin, Ismail, dan Muhammad Nur yang paling berjasa setelah kedua orang tua senantiasa memberikan motivasi yang sangat baik.
12. Untuk keluarga besar Pangsit ijo Parepare, pakde, ibu Aji, kak ippang dan semua teman-teman seperjuangan Adit, Mba Muli, Mba Kasma, Mama Tina, Dea, Lestari, Meli, Reno, Iron, Mail, Lia, Marlin, Yani, Dewi, Haikal, Sahrul, Linda, Nayla dan semua teman seperjuangan yang namanya tidak dapat disebut satu persatu terima kasih atas *support* dan waktunya selama ini dan senantiasa memberikan dukungan kepada penulis hingga detik ini.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerabat dekat saya terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 19 Januari 2024
7 Rajab 1445 H

Penulis,



RESKI

NIM. 19.2800.049



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : R E S K I
NIM : 19.2800.049
Tempat/Tgl. Lahir : Lainungan, 13 Februari 2001
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan pada Badan Pusat Statistik Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Januari 2024

Penyusun,



RESKI

NIM. 19.2800.049

ABSTRAK

Reski. *Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan pada Badan Pusat Statistik Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)*. (Dibimbing oleh Syahriyah Semaun dan Saddam Husain)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada badan pusat statistik (BPS) Parepare serta Penerapan Standar Akuntansi setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan analisis akuntansi terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*) dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare telah menyajikan laporan keuangan dengan baik dan akuntabel. Dan memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Ditinjau dari penerapan prinsip akuntansi syariah, badan pusat statistik (BPS) Parepare telah menerapkan prinsip syariah, yakni prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrua, Prinsip Akuntansi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Sinyal (Signalling theory)	13
2. Akuntansi Pemerintahan	16
3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	18
4. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua.....	21
5. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	24
6. Basis Akuntansi.....	28
7. Nilai dan Prinsip Akuntansi Syariah	33
C. Kerangka Konseptual	39
1. Standar akuntansi pemerintahan	39

2. Basis Akuntansi.....	39
3. Prinsip Akuntansi Syariah.....	39
D. Kerangka pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan waktu penelitian	42
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
F. Uji Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.....	49
2. Penerapan Akuntansi Syariah pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare	59
B. Pembahasan Hasil Penelitian	69
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.....	69
2. Penerapan Akuntansi Syariah pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare	75
BAB V PENUTUP.....	82
A. SIMPULAN	82
B. SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	87
BIODATA PENULIS	110

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Laporan realisasi anggaran BPS Parepare periode 31 desember 2022 dan 31 desember 2021	55
4.2	Neraca Per 31 desember 2022 dan 31 desember 2021	56
4.3	Laporan operasional periode berakhir 31 desember 2022 dan 31 desember 2021	57
4.4	Laporan Perubahan Ekuitas Periode Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	57
4.5	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	62
4.6	Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	62
4.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2022	63
4.8	Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	64
4.9	Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	65
4.10	Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	66
4.11	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	67
4.12	Indikator karakteristik kualitas laporan Keuangan	74

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	39



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat keputusan penetaan pembimbing skripsi	85
2	Permohonan izin pelaksanaan penelitian	86
3	Rekomendasi penelitian dari DPMPTSP	87
4	Surat selesai meneliti	88
5	Pedoman wawancara	89
6	Surat keterangan wawancara	92
7	Gambaran umum Badan Pusat Statistik	96
8	Dokumentasi wawancara	97
9	Laporan Keuangan BPS Parepare	98

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	șad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yá'</i>	A	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
ئِ	<i>kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>

نُعْمَ : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (جِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalâh* (bukan *az-zalzalâh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilâdu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal),

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- swt. : *subhānahū wa ta'āla*
- saw. : *ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam*
- a.s. : *'alaihi al-sallām*
- H : Hijrah
- M : Masehi
- SM : Sebelum Masehi
- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
- w. : Wafat tahun
- QS/.... : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/..., ayat 4
- HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi menuntut perwujudan sebuah pemerintahan yang baik sehingga tercipta sebuah transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara atau yang lebih dikenal dengan *good governance* (tata kelola yang baik). Pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Tata kelola yang baik menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.

Perkembangan pengelolaan keuangan pada sektor publik di Indonesia saat ini, yakni dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas menurut Simbolon, ialah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang dimiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.¹ Pengelolaan Keuangan Negara awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagai dasar pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut sekaligus memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang

¹ Selmita Paranaon dkk., *Akuntabilitas kinerja sektor publik*, ed. oleh St. Salmah Sharon (CV. Media sains indonesia, 2022).

telah disempurnakan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, yang mengatur kewenangan dan sistem pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²

Pada tahun 2010 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 tahun 2005. Lebih lanjut, Pada tahun 2013 terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrua di Pemerintah Daerah. Berlakunya PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual memberikan perubahan yang signifikan dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. sehingga diharapkan dengan adanya perubahan basis tersebut mampu memberikan gambaran yang lengkap atas posisi keuangan pemerintah dan menyajikan informasi yang transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, dalam menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.³

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara serta pelaporan keuangan pemerintah. pihak-pihak yang berkepentingan terhadap standar akuntansi pemerintah yakni Auditor, masyarakat, serta pemerintah. standar akuntansi pemerintahan perlu ditingkatkan sehingga dapat memperbaiki praktik pengelolaan akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan. SAP menjadi dasar

² Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, ed. oleh Suryadi Saat dan Yati Sumiharti (Penerbit Erlangga, 2005).

³ Pandapotan Ritonga, *Keuangan Negara*, ed. oleh Mhd Arifin (Umsu Press, 2021).

institusi pemerintahan dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintah.⁴

Dalam laporan keuangan pemerintahan ada dua metode pencatatan akuntansi, yakni basis kas dan basis akrual. Basis kas merupakan sebuah pencatatan transaksi ekonomi dan transaksi lainnya ketika kas diterima atau dikeluarkan. Sedangkan basis akrual merupakan pencatatan transaksi yang pencatatannya dicatat pada saat transaksi atau peristiwa tersebut terjadi. Penerapan basis kas dianggap masih kurang mampu untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga muncul standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.⁵ Implementasi kebijakan penerapan basis akrual ini merupakan salah satu program reformasi birokrasi, dimana pemerintahan yang selama ini kurang akuntabel dan transparan dalam hal pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual bertujuan untuk memberi manfaat lebih baik bagi pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Meskipun demikian, penyiapan Pertanyaan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare merupakan badan pemerintah yang seharusnya menerapkan SAP berbasis akrual. Sebagai badan pemerintah non-

⁴ Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda, dan Basuki Rachmat, *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*, ed. oleh yudi rihanto Santoso (PT. Remaja rosadakarya, 2020).

⁵ Hantano dkk., *Akuntansi sektor publik*, ed. oleh Syaiful Bahri (CV. Media sains indonesia, 2021).

kementerian. Namun, perubahan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak dan implikasi. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi.⁶

Pada Badan pusat statistik kota parepare dalam membiayai kegiatan dan melaksanakan tugasnya memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan belanja negara/daerah (APBN/APBD). Oleh karena itu, badan pusat statistik kota parepare seaharusnya menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran negara dan daerah yang diperolehnya, harus berlandaskan pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang diharapkan dapat memberikan landasan penerapan akuntansi pemerintahan yang lebih baik untuk memperbaiki kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah di Indonesia. Dengan melaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, apakah laporan keuangan tersebut sudah memenuhi akuntabilitas dan transparansi.⁷

⁶ Weda Ayu Margareta dan Ikhsan Budi Riharjo, “kesiapan instansi pemerintah dalam implementasi standarakuntansi pemerintah berbasis akrual,” *Jurnal ilmu & riset akuntansi*, 2015.

⁷ Hetti Herlina, “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010,” *Jurnal Akuntansi*, 1.3 (2013).

Namun, dalam praktiknya akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini tidak selalu berjalan dengan mulus dan lancar. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan karakteristik lingkungan sektor publik. Rendahnya kualitas laporan keuangan oleh aparatur pemerintah yang resisten terhadap reformasi pengelolaan Keuangan Negara, yang mana ditunjukkan dengan mental korup pemerintah yang masih sangat kuat. Disamping itu, penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, memerlukan sistem akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit. lemahnya Komitmen pimpinan, kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan, serta resistensi terhadap perubahan dari pihak internal instansi pemerintahan.⁸

Berdasarkan uraian diatas, pengevaluasian dari kebijakan SAP berbasis akrual sangat diperlukan, hal ini untuk mengetahui apa yang menjadi faktor kegagalan atau keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada badan pusat statistik kota parepare, peneliti ingin mengetahui mekanisme transparansi dan akuntabilitas terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Badan Pusat Statistik Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)”

⁸ A Fauzi, “Analisis implementasi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 di pemerintah daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah kabupaten serang),” 2019, hal. 8.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare?
2. Bagaimana penerapan SAP pada badan pusat statistik Parepare setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?
3. Bagaimana analisis akuntansi terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis AkruaI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
3. Untuk mengetahui analisis akuntansi terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis AkruaI.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan referensi dalam pengembangan wawasan baik kepada penulis sendiri maupun kepada akademisi maupun praktisi. Adapun manfaat atas penelitian ini yakni;

1. Kegunaan teoritis
 - a. Bagi Peneliti, untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, serta pemahaman mengenai penerapan standar akuntansi berbasis akrual dalam pemerintahan. Sehingga dapat mengembangkan wawasan tentang akuntansi pemerintahan.
 - b. Bagi Akademisi/Praktisi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan akuntansi dan menjadi bahan riset dibidang akuntansi, khususnya pada akuntansi pemerintah. Serta dapat memberikan informasi dan referensi bagi Institusi mengenai standar akuntansi berbasis Akrual, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan pada badan pusat statistik (BPS) Parepare sesuai dengan peraturan pemerintah tentang perundang-undangan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah berbasis Akrual. Sehingga apabila ada kekurangan atau sistem yang kurang baik, maka dapat melakukan perbaikan dan menyempurnakan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penerapan standar akuntansi berbasis akrual, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh.

1. Syalom K. Runtuwene dan Hendrik Gamaliel Tahun 2019 dengan judul penelitian “Evaluasi penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang perubahan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tidak berdampak langsung terhadap Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada provinsi sulawesi utara, karena pemerintah pusat tidak memberikan pemahaman tentang perubahan SAP. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, akan memburai stigma bahwa menggunakan aplikasi sama dengan menggunakan prosedur akuntansi yang berlaku. Sehingga hal ini memengaruhi ketidaktahuan aparatur sipil negara mengenai proses pembukuan akuntansi yang sebenarnya.⁹

⁹ S K Runtuwene dan H Gamaliel, “Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi,” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7.4 (2019), 4504–13.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama ingin mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah nomor 71 tahun 2010. Adapun perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Syalom K. Runtuwene dan Hendrik Gamliel memfokuskan pada pencatatan single entry atau double entry. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sudah diterapkan oleh dinas dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi, dan kendala yang dihadapi yaitu aplikasi sering error dan kurangnya adaptasi ASN terhadap peraturan yang baru terlebih untuk PP No. 71 Tahun 2010. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada sumber daya manusia pemerintah daerah dalam pengaplikasian pengelolaan keuangan negara. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyajikan laporan keuangan telah memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

2. Diana Westi Jebian dan Cindy Getah Trisna June Tahun 2020 dengan judul penelitian “Evaluasi penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada kabupaten Manggarai (Studi Kasus pada badan keuangan kabupaten manggarai kota Ruteng)”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi menunjukkan kesiapan Pemkab Manggarai dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Namun pemerintah kabupaten manggarai terkendala oleh kurangnya sumber daya teknologi seperti komputer. Strategi menghadapi kendala dalam implementasi PP No. 71 tahun 2010 tentang penerapan SAP, yakni penambahan

jaringan komputer yang sudah tersistem dengan program simda, serta bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan terkait SAP berbasis akrual.¹⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Adapun letak perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Diana Westi Jebian dan Cindy Getah Trisna June, lebih memfokuskan pada kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Keuangan Kabupaten Manggarai yang diindikasikan menghadapi kendala dalam implementasi PP N0. 71 tahun 2010, maka dari itu, perlu adanya bimbingan teknik dan pelatihan terkait SAP berbasis akrual serta menambah jaringan komputer yang sudah secara tersistem dengan program simda. Sedangkan penelitian ini berfokus pada faktor-faktor pendukung yang memengaruhi kesuksesan sistem akuntansi akrual secara penuh (*full accrual*) yakni sistem informasi, sumber daya manusia, infrastruktur dan komitmen. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare sistem informasi, infrastruktur dan komitmen sudah memadai, dan sumber daya manusia telah kompeten pada bidangnya masing-masing.

3. Merisa Oktaria Tahun 2019, dengan judul penelitian “Pengaruh kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual”. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui kesiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan

¹⁰ Diana Westi Jebian and Cindy Getah Trisna June, ‘Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Kabupaten Manggarai (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Kota Ruteng)’, *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 2.2 (2020), 8–15.

provinsi di wilayah provinsi Kalimantan Tengah dalam menerapkan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 dan melihat bagaimana komitmen Organisasi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi berbasis akrual dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta komitmen organisasi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.¹¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Adapun letak perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Merisa Oktaria lebih memfokuskan pada kesiapan Pemda kabupaten/kota dan provinsi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Badan Pusat Statistik Parepare. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pada Badan Pusat Statistik Parepare telah memadai. Selain itu, sumber daya manusia yang sudah kompeten dalam bidangnya masing-masing dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP 71 Tahun 2010.

4. Alisha Ristanti Hermawan Tahun 2022, dengan judul penelitian “Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas sumber daya manusia

¹¹ Merisa Oktaria, ‘Pengaruh Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual (Studi Pada Pemda Kabupaten/Kota Dan Provinsi Yang Ada Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah)’, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 13.2 (2019), 181–99.

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota kediri periode 2017-2020”. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sumber daya manusia secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Kediri periode 2017-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara Standar Akuntansi Pemerintahan dan sumber daya manusia secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Kediri periode 2017-2020.¹²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan. Adapun letak perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Alisha Ristanti Hermawan lebih memfokuskan pada pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada faktor-faktor pendukung yang memepengaruhi kesuksesan sistem akuntansi akrual secara penuh (*full accrual*) yakni sistem informasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sistem informasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur, telah memadai dalam penerapan PP 71 Tahun 2010. Selain itu, Badan Pusat Statistik Pareare, telah memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

5. Andi Ayu Frihatni, Nirwana, Syamsuddin Tahun 2021, dengan judul penelitian “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi

¹² Alisha Ristanti Hermawan, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah kota Kediri periode 2017-2020,” *Jurnal ilmiah multi disiplin Indonesia*, 2022.

Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare”. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengungkapkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam kerangka kerja standar akuntansi pemerintahan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam transparansi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, publikasi laporan keuangan dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik yang dapat diakses oleh semua orang.¹³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun letak perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Andi Ayu Frihatni, Nirwana, Syamsuddin lebih memfokuskan pada Transparansi dan Akuntabilitas. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan anggaran pemerintah Kota Parepare juga melibatkan masyarakat melalui Musrenbang dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyajikan laporan keuangan dengan baik dan akuntabel, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Signal (*Signalling theory*)

Teori signal (*signalling theory*) merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan kepada investor. Signal tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk, baik yang langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan

¹³ Andi Ayu Frihatni, Nirwana, dan Syamsuddin, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4 (2021).

penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Signal disampaikan melalui aksi korporasi dapat berupa sinyal positif dan sinyal negatif.

Teori signal ini pertama kali dikembangkan oleh Ross tahun 1977. Dalam membangun teori signal berdasarkan adanya informasi asimetris antara informasi yang berasal dari manajemen (*well-informed*) dan informasi yang berasal dari pemegang saham (*poo informed*). Teori ini berdasarkan pemikiran bahwa manajemen akan memberikan informasi kepada investor atau pemegang saham ketika mendapatkan informasi yang baik yang berkaitan dengan perusahaan seperti peningkatan nilai perusahaan. Akan tetapi, investor tidak mempercayai informasi tersebut karena para manajer dianggap memiliki kepentingan tersendiri (*interest party*), sehingga perusahaan yang memiliki nilai tinggi akan melakukan signaling terhadap kebijakan keuangan perusahaan dan hal ini berbeda dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah.¹⁴

Para ahli telah menyampaikan teori signal (*signalling theory*) sebagai berikut:

- a. Menurut Houston, isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Signal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis, karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran, baik untuk keadaan

¹⁴ Fenty Fauziah, *Kesehatan bank, kebijakan dividen, dan nilai perusahaan teori dan kajian empiris*, ed. oleh Musa (RV Pustaka Horizon, 2017).

masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan.¹⁵

- b. Menurut Megginson. Model signal dividen membahas ketidak sempurnaan pasar yang membuat kebijakan pembayaran yang relevan yaitu informasi asimetris. Jika manajer mengetahui bahwa perusahaan mereka kuat sementara investor tidak mengetahui hal ini, maka manajer dapat membayar dividen (atau secara agresif membeli kembali saham) dengan harapan memberikan kualitas sinyal perusahaan mereka ke pasar. Signal secara efektif memisahkan perusahaan yang kuat dengan perusahaan-perusahaan yang lemah (sehingga perusahaan yang kuat dapat memberikan sinyal jenisnya ke pasar), Hal ini menjadi mahal untuk sebuah perusahaan yang lemah untuk meniru tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang kuat.¹⁶

Dalam perumusan teori *signalling*. Penelitian Spence membahas tentang signal dan apa yang disampaikan signal tersebut dalam pasar kerja dihubungkan dengan indikator ekonomi sebagai model dari fungsi *signalling*. Penelitian Spence mengenai potensi manajer yang kekurangan informasi tentang kualitas dari investor. Investor yang memperoleh signal mengenai kualitas perusahaan tersebut akan mengurangi asimetri informasi. Hal ini diduga merupakan signal yang dapat diandalkan oleh investor, karena investor berkualitas rendah tidak akan mampu bersaing dengan investor yang pintar.

¹⁵ T. Renald Suganda, *Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia* (Puntadewa, 2018).

¹⁶ Ade Gafar Abdullah dkk., *Increasing Management Relevance and Competitiveness* (CRC Press, 2018).

Selain itu, terdapat juga bukti empiris Bhattacharya, bahwa jika ada kenaikan dividen, sering diikuti dengan kenaikan harga saham, sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan penurunan harga saham perusahaan. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa para investor lebih menyukai dividen daripada *capital gain*. Namun Modigliani dan Miller berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen biasanya merupakan suatu signal kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penurunan dividen atau kenaikan dividen yang dibawah kenaikan normal (biasanya) diyakini investor sebagai suatu signal bahwa perusahaan menghadapi masa sulit di waktu mendatang.

Manajemen perusahaan yang didasari motivasi *signalling* yang berkaitan dengan pembagian dividen merupakan harapan bahwa kinerja perusahaan dapat memberikan signal positif terhadap suatu investasi. Signal ini akan membawa para investor untuk melakukan investasi melalui pembelian saham perusahaan. Semakin banyak investor yang melakukan investasi pada perusahaan, akan mendorong terjadinya peningkatan volume transaksi perdagangan saham perusahaan tersebut. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan harga pasar saham perusahaan atau peningkatan nilai perusahaan.¹⁷

2. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan kegiatan pelayanan jasa yang menyajikan informasi keuangan milik pemerintah yang mengedepankan proses pencatatan, klasifikasi, ikhtisar dan juga transaksi keuangan pemerintah dan juga penafsiran dari informasi keuangan tersebut.

¹⁷ Fenty Fauziah, *Kesehatan bank, kebijakan dividen, dan nilai perusahaan teori dan kajian empiris*, ed. oleh Musa (RV Pustaka Horizon, 2017).

Pemerintah merupakan bentuk organisasi sektor publik yang mempunyai tujuan untuk mensejahterkan rakyat sebagai tujuan umum. Guna mewujudkan tujuan tersebut, tentu ada aturan umum yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan konstitusi dan juga undang-undang dasar serta peraturan perundang-undangan lain.

Akuntansi pemerintahan dan juga bisnis berdasarkan pengukuran kinerja, membuat kedua aspek ini, mempunyai tujuan yang terdiri dari:

a. Akuntabilitas

Fungsi ini memiliki peran yang lebih luas dari hanya ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saja. Namun menjadi perhatian bagi penggunaan sumber daya yang digunakan secara bijaksana, efisien dan juga ekonomis serta efektif.

b. Manajerial

Akuntansi pemerintah memberikan kemungkinan bagi pemerintah guna menjalankan fungsi manajerial dalam merencanakan dan menyusun anggaran negara atau APBN dan juga strategi di sektor pembangunan.

c. Pengawasan

Akuntansi pemerintah dibuat guna mengawasi proses keuangan negara agar bisa diperiksa dengan mudah oleh lembaga-lembaga keuangan seperti BPK.¹⁸

Menurut bachtiar & Muchlis, yang dikutip dalam buku Teori Administrasi Publik mendefinisikan akuntansi pemerintah sebagai suatu

¹⁸ Syahril Hidayat, *Akuntansi pemerintahan*, ed. oleh Anita Safitri Nasution (PT Inovasi Pratama Internasional, 2021).

aktivitas pemberian jasa yang menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi tersebut. Jenis akuntansi pemerintahan yang dicatat merupakan bentuk transaksi keuangan pemerintah yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dalam akuntansi bisnis. Sedangkan menurut Abdul halim menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.¹⁹

3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut Paul Grady yang dikutip oleh Firdaus Hamta dalam buku metodologi penelitian akuntansi, yakni Akuntansi adalah kumpulan pengetahuan dan fungsi organisasi yang mencatat, mengkategorikan, memproses, meringkas, menganalisis, dan menafsirkan semua karakter keuangan serta semua transaksi dan peristiwa yang terjadi dalam operasi entitas akuntansi. Hal ini dilakukan untuk memberikan manajemen informasi yang berarti yang dibutuhkannya untuk laporan dan meminta pertanggungjawabannya atas kepercayaan yang diterimanya.²⁰

¹⁹ Ahmad Mustanir dkk., *Teori Administrasi Publik*, ed. oleh Dian Purnama Sari dan Ari Yanto (Global Eksekutif Teknologi, 2023).

²⁰ Firdaus Hamta, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (deepublish, 2015) hal. 8.

Definisi akuntansi ditinjau dari segi;

a. Ilmu pengetahuan

Akuntansi merupakan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari sebuah proses pemikiran sehingga dihasilkan suatu konsep, prinsip, standar, prosedur, maupun teknik.

b. Akuntansi sebagai sistem

Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem dan metode, pengolahan data, perekaman atas kejadian-kejadian atau disebut dengan transaksi, serta sebagai sistem yang digunakan dalam mencapai sebuah akuntabilitas (pertanggung jawaban).

c. Akuntansi sebagai alat

Akuntansi merupakan sebuah metode yang tidak mampu berdiri sendiri, sehingga memerlukan dukungan fisik baik seperti, formulir, dokumen dan lain-lain, serta akuntansi memerlukan sebuah aplikasi berbasis sistem informasi, sebagai alat bantu dalam memberikan informasi keuangan yang praktis, cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan bagi manajemen.²¹

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang didalamnya terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hal ini digunakan untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD. Dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman, dasar, acuan wajib, serta mempunyai kekuatan

²¹ Firdaus Hamta, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (deepublish, 2015) hal. 9.

hukum didalam menyusun serta menyampaikan laporan keuangan pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah untuk menyatukan persepsi antar penyusun, pengguna, auditor dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel.²²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terkait SAP pada Pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam membuat dan melakukan penyusunan laporan keuangan yang disajikan untuk pemerintah. Komite SAP bertugas menyusun peraturan pemerintah yang mencantumkan SAP sebagai prinsip akuntansi yang harus diikuti dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dalam mengembangkan SAP, KSAP bertujuan untuk mengembangkan program akuntabilitas dan manajemen.

SAP berbasis akrual adalah jenis SAP yang menggunakan basis akrual untuk melaporkan pendapatan Operasional (LO), biaya, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga melaporkan pendapatan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja, dan pembiayaan dalam melaporkan pelaksanaan anggaran sesuai APBN atau APBD. Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, disajikan 12 PSAP dan kerangka konseptual sebagai berikut:

- a) Kerangka konseptual akuntansi pemerintah
- b) PSAP 01 : Penyajian laporan keuangan
- c) PSAP 02 : Laporan realisasi anggaran (LRA) berbasis kas
- d) PSAP 03 : Laporan arus kas

²² Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Penerbit Erlangga, 2005).

- e) PSAP 04 : Catatan atas laporan keuangan
- f) PSAP 05 : Akuntansi Persediaan
- g) PSAP 06 : Akuntansi Investasi
- h) PSAP 07 : Akuntansi aset tetap
- i) PSAP 08 : Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan
- j) PSAP 09 : Akuntansi kewajiban
- k) PSAP 10 : Koreksi kesalahan, pereubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan
- l) PSAP 11 : laporan keuangan konsolidasian
- m) PSAP 12 : Laporan operasional (LO)

4. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju AkruaI (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005)

Pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah RI dalam hal ini Departemen Keuangan mendirikan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dengan Keputusan Presiden RI Nomor 84 tahun 2004 tentang Keanggotaan KSAP untuk memenuhi undang-undang Keuangan Negara tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah NKRI lahir untuk pertama kali pada bulan juni 2005 yang merupakan anak tangga menuju cita-cita sebuah standar akruaI paripurna tahun 2008 sesuai amanat UU Keuangan Negara. Standar tersebut dikenal dengan Standar Akuntansi menuju AkruaI.²³

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akruaI pada PP Nomor 24 Tahun 2005 merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang

²³ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, ed. oleh Suryadi Saat dan Yati Sumiharti (Penerbit Erlangga, 2005) Hal. 133-135.

digunakan pada pemerintah daerah sebelum akuntansi berbasis akrual diberlakukan. Basis akuntansi kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Komponen laporan keuangan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:²⁴

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Unsur-unsur yang dicakup dalam LRA adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Pembiayaan

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Adapun pos-pos pada neraca sebagai berikut :

- 1) Kas dan Setara Kas
- 2) Investasi jangka pendek
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak
- 4) Persediaan
- 5) Investasi jangka panjang

²⁴ Dito Aditia Darma Nasution, *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)*, ed. oleh Fungky (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019) Hal.21-22.

- 6) Aset tetap
- 7) Kewajiban jangka pendek
- 8) Kewajiban jangka panjang
- 9) Ekuitas dana

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau perincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Adapun CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/APBD, dan kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dari kejadian-kejadian penting.
- 4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan sebest mungkin disajikan pada lembar muka (*on the face*).

5. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)

Dewasa ini tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik di daerah maupun di pusat menjadi fenomena dalam perkembangan sektor publik di Indonesia. Penerapan basis akrual bukan merupakan kesukarelaan semata, ini merupakan amanat dari undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara, sehingga basis akrual pada akhirnya harus diterapkan bagi seluruh pemerintah daerah maupun pusat.

SAP Berbasis Akrual merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dari pasal 36 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dari pasal 70 ayat 2, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 harus diganti.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan basis akuntansi dari basis kas menuju akrual menuju basis akrual penuh yang digunakan saat ini berpengaruh dalam perubahan komponen laporan keuangan pemerintahan, baik itu dalam pelaksanaan anggaran, dan laporan finansial, sehingga seluruh komponennya menjadi sebagai berikut:²⁵

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan unsur-unsur :

²⁵ Syahril Effendi, *Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintahan Daerah* (CV Batam Publisher, 2021) Hal. 8-36.

- 1) Pendapatan LRA
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus/defisit LRA
- 5) Pembiayaan
- 6) Penerimaan pembiayaan sisa lebih/kurang

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan ini merupakan salah satu laporan yang sebelumnya tidak ada dalam laporan keuangan pokok pada basis kas. Pos-pos dalam SAL sebagai berikut :

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- 3) SiLPA/SiKPA tahun berjalan
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan periode sebelumnya
- 5) Saldo Anggaran Lebih akhir
- 6) Lain-lain

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menunjukkan kinerja suatu entitas dalam satu periode. Unsur-unsur yang ada didalam laporan operasional adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Laporan Operasional
- 2) Beban dari kegiatan Operasional
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non-operasional
- 4) Pos luar biasa

5) Surplus/defisit Laporan Operasional

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas yang dimana laporan tahun berjalan dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Unsur-unsur laporan perubahan ekuitas sebagai berikut :

- 1) Ekuitas awal
- 2) Surplus/defisit Laporan Operasional pada periode bersangkutan
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas

e. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur-unsur yang disajikan dalam neraca sebagai berikut :

- 1) Aset, sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang
- 2) Kewajiban, utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk/keluar untuk pemerintah
- 3) Ekuitas, kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih dari aset dikurangi kewajiban pemerintah

f. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas

pemerintah pusat/daerah dalam periode tertentu. Unsur-unsur yang dicakup dalam laporan arus kas sebagai berikut :

- 1) Arus kas dari aktivitas operasi
- 2) Arus kas dari aktivitas investasi
- 3) Arus kas dari aktivitas pendanaan

g. CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan)

Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan interpretasi dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh suatu entitas. CaLK mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengungkapkan informasi umum terkait entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- 2) Menyajikan informasi terkait kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- 3) Menyajikan informasi tentang dasar dalam penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan.
- 4) Menjelaskan perincian masing-masing pos pada lembar muka laporan keuangan.
- 5) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum dilaporkan dalam lembar muka laporan keuangan.

6. Basis Akuntansi

SAP berbasis AkruaI menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dapat diterapkan secara bertahap dari SAP berbasis kas menuju akruaI menjadi penerapan SAP berbasis AkruaI. *Modified accrual basis* merupakan memodifikasi basis akruaI misalnya hampir seluruh aset dan kewajiban diukur dengan basis akruaI, namun pendapatan diukur berdasarkan basis kas atau modifikasi kas sehingga basis akruaI tidak diterapkan secara penuh. Penerapan SAP berbasis akruaI secara bertahap akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (permenkeu) dan peratutran menteri dalam negeri (permendagri). Begitu juga, apabila diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut akan diatur dengan permenkeu setelah mendapat pertimbangan dari BPK dengan tetap melalui proses baku penyusunan. SAP mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur, dan melaporkannya. Oleh karena itu, SAP mengatur penyajian pos-pos yang harus disajikan dalam laporan keuangan seperti pos kas, piutang, aset tetap, dan seterusnya.²⁶

Pengakuan dalam akuntansi menurut SAP yakni, proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan belanja, dan pembiayaan. Basis akuntansi merupakan himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. berbagai basis akuntansi dalam sistem pencatatan yakni, basis kas (*cash basis*), basis

²⁶ Hantano dkk., *Akuntansi sektor publik*, ed. oleh Syaiful Bahri (CV. Media sains indonesia, 2021).

akrual (*accrual basis*) basis kas modifikasi (*modified cash basis*), dan basis akrual modifikasi (*modified accrual basis*).²⁷

Basis akuntansi merupakan pengakuan atas hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan. perbedaan basis akan berpengaruh terhadap proses akuntansi. Dalam akuntansi dikenal adanya dua basis yakni, basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah basis yang mengakui timbulnya hak atau kewajiban pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Basis akrual adalah basis yang mengakui adanya hak atau kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas diterima atau dikeluarkan.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan sebagai SAP berbasis akrual, namun sebenarnya basis akuntansi yang digunakan tidak sepenuhnya basis akrual. Bahkan mengarah pada penggunaan basis akrual modifikasian, yaitu transaksi-transaksi tertentu dicatat dengan menggunakan basis kas dan untuk sebagian besar transaksi dicatat menggunakan basis akrual. SAP berbasis akrual menurut PP Nomor 71 tahun 2010 adalah SAP yang mengakui pendapatan-LO, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD, yaitu basis kas. Jadi, sebenarnya SAP tidak menganut basis akrual secara penuh tetapi basis modifikasian, yaitu akrual modifikasian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban

²⁷ Abdul Halim, *akuntansi keuangan daerah* (Salemba Empat, 2008).

yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar atau asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Sementara, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah.²⁸

a. Basis kas (*Cash basis*)

Dalam penerapan akuntansi berbasis kas, pendapatan dicatat pada saat diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Manfaat utama penerapan *cash basis* yakni, mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan objektif. Namun demikian, pencatatan dengan basis kas kurang mencerminkan kinerja secara keseluruhan, karena belum dapat menyajikan hak dan kewajiban organisasi secara utuh (*full picture*).

b. Basis akrual (*Accrual basis*)

Pencatatan akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antara *proprietary fund (full accrual)* dengan *governmental fund (modified accrual)* karena biaya

²⁸ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *akuntansi sektor publik*, ed. oleh Ema Sri Suharsi (Salemba Empat/Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi, *akuntansi sektor publik*, ed. oleh Ema Sri Suharsi (Salemba Empat, 2013), 2013).

(*expense*) diukur dalam *proprietary fund*, sedangkan *expenditury* fokusnya pada *general fund*. *Expenditure* adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Karena *governmental fund* tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat/dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang), *expenditure* yang diukur, bukan *expense*.

Berbeda dengan *governmental fund*, yang menjadi kepentingan *proprierty fund* dan juga organisasi bisnis adalah *net income*. *Full accrual accounting* digunakan untuk mencatat *revenue* ketika diperoleh (*incured*). Dengan kata lain, biaya dicatat ketika utang terjadi tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan.

Dalam *governmental fund*, hendaknya digunakan *modified accrual basis*. *Expenditure di-accrue*, tetapi *revenue* dicatat berdasarkan basis kas, yaitu pada saat diterima, bukan ketika diperoleh. Pendapatan seperti PPN, PPh, dan fee (retribusi) dihitung pada saat diterima kasnya. Salah satu pengecualian adalah *property tax* (PBB) yang di-*accured* karena jumlahnya dapat diestimasi secara lebih pasti.

Pengaplikasian *accrual basis* dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of services* dan *charging for services*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian *accrual basis* dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (*propper matching cost against revenue*). Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimalkan laba (*profil oriented*), sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (*public service oriented*).

Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat hak diperoleh (*earned*) atau kewajiban terjadi (*incurred*), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Pengenalan terhadap accrual basis memberikan kontribusi yang kurang signifikan terhadap transparansi, efisiensi, dan efektivitas organisasi publik di negara tersebut. Perubahan dari cash basis menjadi *accrual basis* memang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Perlu analisis yang mendalam dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang memengaruhinya salah satunya adalah faktor sosiologi masyarakat.

Basis kas dan basis akrual dalam akuntansi memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan perbedaan karakteristik tersebut tentunya peralihan basis akuntansi dari kas menjadi akrual membutuhkan beberapa penyesuaian, antara lain pada standar akuntansi, sistem akuntansi, teknologi informasi pendukung, serta mindset dan pengetahuan para pengelola keuangan dan penyusun laporan keuangannya. Suatu entitas sektor publik yang akan melakukan peralihan basis akuntansi dari kas menjadi akrual biasanya membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Pada masa transisi tersebut, dalam rangka peralihan dari basis kas menuju basis akrual, banyak entitas sektor publik menerapkan basis modifikasi yang sering disebut dengan *Cash Toward Accrual (CTA)* atau *Cash Transitioning To Accrual*. Basis modifikasi tersebut biasanya diterapkan dengan mengadopsi basis akrual dengan porsi atau tingkatan tertentu. Pemerintah Indonesia pernah menerapkan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) dalam penyusunan laporan keuangannya selama masa transisi yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun

2005 tentang standar akuntansi pemerintah disebutkan bahwa basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) mengakui atau mencatat pendapatan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang. Dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual.²⁹

7. Nilai dan Prinsip Akuntansi Syariah

Salah satu ayat al-qur'an atau firman Allah SWT tentang pencatatan akuntansi yakni Q.S. Al-Baqarah : 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ³⁰

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, hendaklah kamu mencatatnya.”³⁰

Ayat tersebut di atas berisi tentang penjelasan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh kebenaran, keterbukaan, kepastian dan keadilan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan muamalah, dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan *accountability*. Ayat tersebut menjadi dasar atau acuan terhadap pencatatan akuntansi dalam Islam.

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat ini secara khusus menjelaskan bahwa setiap orang beriman yang melakukan utang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu yang ditentukan pembayarannya, maka waktunya harus jelas. Pencatatan waktunya diharuskan untuk melindungi hak masing-masing serta

²⁹ Mardiasmo, *Akuntansi sektor publik* (CV. Andi Offset, 2018).

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019.

menghindari perselisihan.³¹ Sedangkan dalam al-Tafsir al-Munir fi al-‘Qidah wa as-Syari’ah wa al- Manhaj menurut Wahbah Zuhaily, Al Baqarah ayat 282 ini membicarakan orang-orang Mukmin yang melakukan transaksi jual beli barang dengan pembayaran kredit atau jual beli saham yang penyerahan kepada pembeli ditangguhkan terhadap batas waktu tertentu.³²

Akuntansi Syari’ah merupakan akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk mentermahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat islam. Menurut Sofyan S. Harahap dalam (Akuntansi Sosial ekonomi dan akuntansi islam) mendefinisikan akuntansi islam atau akuntansi syariah pada hakekatnya merupakan penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah islam.

Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak zhulum (Kezaliman), riba, masyir (judi), gharar (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan. Kerangka konseptual akuntansi syariah juga dibangun dari tujuan yang pada akhirnya digunakan untuk merumuskan teknik akuntansi, yakni: ³³

- a. Syariah
- b. Moral Sosial Ekonomi Politik

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an* (Lentera Hati, 2009).

³² Wahbah As-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1* (Gema Insani, 2013).

³³ Zulhelmy dan Suhendi, *Dasar-dasar Akuntansi Islamic View*, ed. oleh Erfan Effendy dan Awliya Afwa (Penerbit Adab, 2021) Hal. 26-27.

- c. Akuntansi Syariah
- d. Teknik: Pengukuran dan Penyingkapan
- e. Manusia: pemegang kuasa/pelaksana
- f. Dasar: Moralitas/etika berdasarkan hukum Tuhan

Akuntansi syariah dan akuntansi konvensional merupakan sifat akuntansi yang diakui oleh masyarakat ekonomi secara umum. Keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masalah ekonomi dan informasi keuangan suatu perusahaan atau sejenisnya. Untuk membedakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi.
- b. Prinsip penahunan (hauiyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan.
- c. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal.
- d. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang.
- e. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost.
- f. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan.
- g. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Sementara itu, menurut Husein Syahatah dalam buku *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, perbedaan kaidah akuntansi syar'i dengan akuntansi konvensional antara lain terdapat pada hal-hal berikut:

- a. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan hingga saat ini pun apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sementara itu,

konsep ekonomi islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinu.

- b. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yakni modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar). Sementara itu, dalam konsep islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (*cash*) dan barang (*stock*). Selanjutnya, barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang.
- c. Dalam konsep islam, mata uang seperti emas, perak dan barang lain yang sama kedudukannya bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya menjadi perantara untuk mengukur dan menentukan nilai atau harga, atau sebagai sumber nilai atau harga.
- d. Konsep konvensional mempraktikkan teori pencadangan dan ketelitian dari penanggungan semua kerugian dalam perhitungan serta mengesampingkan laba yang bersifat mungkin. Di pihak lain, konsep islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara menentukan nilai atau harga berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membangun cadangan bagi kemungkinan bahaya dan risiko.³⁴

Konsep adanya sistem syariah dapat dijadikan sebagai nilai dasar dalam pembangunan kerangka konseptual sistem akuntansi syariah. Rancangan yaitu sebagai berikut:

³⁴ Windya Novita, *Mendulang Rezeki dengan Bisnis Syar'i* (Gramedia Pustaka Utama, 2013) Hal. 87-88.

- a. Menunjukkan perlunya sistem akuntansi alternatif bagi orang islam dengan menguji secara kritis sistem akuntansi konvensional yang dikembangkan berdasarkan pada nilai barat.
- b. Memberikan suatu pemahaman konsep dasar akuntansi syariah yang didasarkan pada syariat islam, dan
- c. Mengusulkan kerangka konseptual akuntansi syariah dan implikasinya terhadap peran akuntansi muslim.

Beberapa nilai-nilai tersebut di atas akan menjadi lengkap dengan adanya prinsip-prinsip umum akuntansi syariah di bawah ini yang menjadi dasar universal dalam operasional akuntansi syariah berdasarkan Q.S. Al-Baqarah: 282 yaitu terdiri dari:³⁵

- a. Prinsip pertanggungjawaban (*Accountability*), merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah Swt. Untuk menjalankan fungsi kekhilafaan di bumi ini. Inti kekhilafaan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

³⁵ Muammar Khaddafi dkk., *Akuntansi Syariah meletakkan nilai-nilai syariah islam dalam ilmu akuntansi*, ed. oleh Arfan Ikhsan (Madenatera, 2016).

- b. Prinsip keadilan, merupakan hal penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis dan nilai inkeren yang melekat dalam fitrah manusia (penafsiran Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 282). Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surah al-baqarah, yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.
- c. Prinsip kebenaran, prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka pengembangan akuntansi islam nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.

Menurut Muhammad Akram Khan dalam Harahap, merumuskan sifat Akuntansi Islam, yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Penentuan laba rugi yang tepat
- b. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan
- c. Ketaatan pada hukum syariah
- d. Keterikatan terhadap keadilan
- e. Melaporkan dengan baik

³⁶ Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah di lembaga keuangan syariah* (Guepedia, 2011) Hal. 20.

f. Perubahan dalam praktek Akuntansi.

C. Kerangka Konseptual

1. Standar akuntansi pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang didalamnya terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hal ini digunakan untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD.³⁷

2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan pengakuan atas hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan. Basis akuntansi/sistem pencatatan merupakan himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu (*timing*) atas pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran tersebut. Berbagai basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan tersebut antara lain adalah basis kas (*cash basis*), basis akrual (*accrual basis*), dan basis kas modifikasi (*modified cash basis*).³⁸

3. Prinsip Akuntansi Syariah

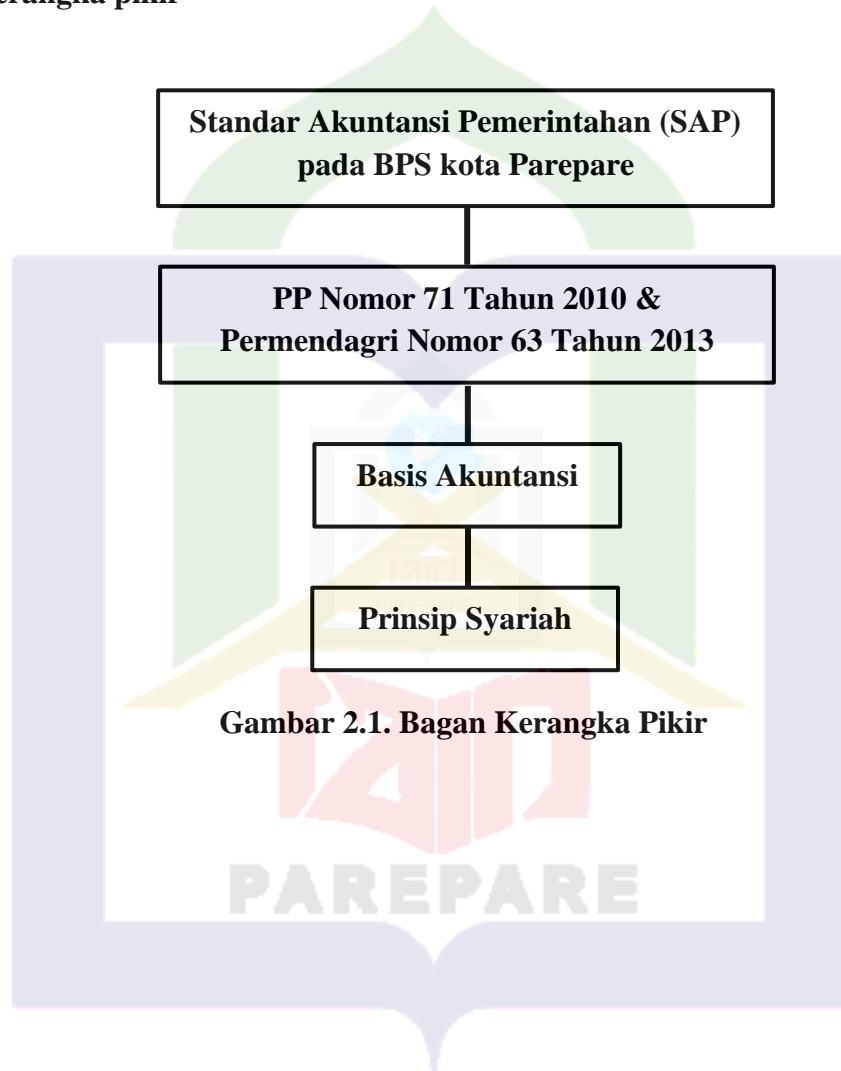
Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga

³⁷ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu pengantar*, ed. oleh Suryadi Saat dan Yati Sumiharti (Penerbit Erlangga, 2005).

³⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Salemba Empat, 2008) Hal. 48.

menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.³⁹

D. Kerangka pikir



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

³⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 5 (Salemba Empat, 2023) Hal 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada didalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, subjek, objek, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁴⁰

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*Case Study*), yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia dari informan dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga data yang diperoleh dari lapangan. Metode tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau pobjek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Kamal Zubair Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare Tahun 2020*, Ed. By Rahmawati, 2020th Edn (Iain Parepare Nusantara Press, 2020).

⁴¹ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004).

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat proses penelitian berlangsung dalam mengkaji dan mencari informasi yang akurat, sehingga mampu memberikan kejelasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batasan wilayah yang jelas. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare. Jl. Jendral sudirman No. 66, Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat.

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana

Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2020-2024, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders).

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dalam kurung waktu kurang lebih 2 bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara peneliti dengan narasumber dan hasil observasi peneliti pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare. Yakni Suparno Pani selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, Sabriah Amir selaku Kasubag Umum, Fitrah Amalia Nurdin selaku Pranata Keuangan APBN Terampil dan Fajrin Thamrin selaku Bendahara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh selain data primer terkait informasi-informasi yang didapat dari media lain untuk melengkapi kebutuhan

penelitian. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Wawancara

Menurut Esterbeg, wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun ide dengan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna serta menarik kesimpulan dalam suatu topik tertentu.⁴²

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen–dokumen penting dalam sebuah penelitian, seperti catatan penting, data arsip, dan catatan lain yang berkaitan dengan subjek penelitian.⁴³ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada badan pusat statistik kota Parepare.

3. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data langsung dari lapangan, sehingga data yang diamati dapat berupa sikap, perilaku, maupun tindakan.⁴⁴ Observasi dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh pengelola laporan keuangan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare.

⁴² Djam'an Satori And Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2017) hal. 130 .

⁴³ Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*, 2009, hal. 13-15.

⁴⁴ Jozef Raco, 'Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya', 2018, hal. 112.

F. Uji Keabsahan Data

Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁴⁵

1. Uji Kepercayaan (*Credibility*)

Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data. *Triangulasi* merupakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. *Triangulasi* sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Tujuan dari *triangulasi* bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi *lebih* pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Matshinton mengemukakan yang dikutip oleh sugiyono dalam buku metode penelitian pendidikan bahwa nilai dari teknik pengumpulan data dengan *triangulasi* adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik *triangulasi* dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti.⁴⁶

⁴⁵ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004) hal. 324.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)*, ed. oleh Apri Nuryanto (Alfabeta, cv, 2019) Hal. 431-433.

Dengan kata lain bahwa dengan *triangulasi*, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai *macam* variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁴⁷

Ada berbagai jenis triangulasi menurut para ahli, salah satunya yakni denzin yang membahas bentuk triangulasi yang berbeda, yaitu triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi metodologis.

- a. Triangulasi data, menggabungkan data yang diambil dari sumber yang berbeda termasuk data verbal seperti wawancara dan diskusi kelompok, dan data visual seperti video dan foto.
- b. Triangulasi teori berarti mendekati data dari berbagai perspektif hipotesis, biasanya dengan menyatukan orang-orang yang memiliki posisi status yang berbeda dalam disiplin ilmu.
- c. Triangulasi metode, mengundang narasi yang diposisikan secara berbeda dan berfokus pada laporan individu yang diposisikan secara berbeda tentang pengalaman episode konkret. Pendekatan dalam metode ini bermaksud untuk menciptakan perspektif yang saling melengkapi tentang isu-isu penelitian serta untuk memperjelas aspek-aspek yang berbeda dari posisi subjektif peneliti yang tidak terelakkan.⁴⁸

⁴⁷ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 332.

⁴⁸ Ade Putra Ode Amane dkk., *Metode Penelitian Kualitatif (Perspektif Bidang Ilmu Sosial)*, ed. oleh Efitra dan Sepriyono (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) hal. 88-89.

2. Uji *Kepastian (Confirmability)*

Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif.⁴⁹ Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan data dari berbagai sumber yaitu beberapa informan berbeda dalam hal ini pegawai dalam Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Susan staincback, mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Spradley menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun, merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan kesesluruhan.⁵⁰

⁴⁹ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 324-326.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)*, Ed. Oleh Apri Nuryanto (Alfabeta, cv, 2019) hal.435-436 .

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Miles dan Huberman mengemukakan, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiono bahwa analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berkesinambungan secara terus menerus sehingga terjadi sebuah kejenuhan data. Adapun aktivitas dalam analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁵¹

1. Mereduksi data, ialah merangkul, melihat hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data, ialah melihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif maupun berupa tabel, bagan, dan sejenisnya.
3. Verifikasi data yaitu upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.⁵²

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, hal. 246.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, hal. 247-252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Adapun hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Penerapan standar akuntansi pemerintah berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 atau yang biasa disebut dengan Basis Akrua, pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare.

Berikut ini akan dijelaskan bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 atau yang biasa disebut dengan Basis Akrua, yang diperoleh dengan indikator penerapan dari hasil wawancara, antara lain:

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber mengenai penerapan standar akuntansi berbasis akrua. Bapak Suparno Pani, selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare mengatakan bahwa:

“Dalam proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kita selalu melibatkan seluruh pegawai dalam mengimplementasikan SAP berbasis Akrua ini, terkhusus pada pengelola Keuangan itu sendiri, guna untuk menghasilkan data yang akuntabel, benar, jelas serta akurat, sehingga mudah dibaca dan dipahami”.⁵³

Dalam wawancara yang lain dilakukan dengan Fitrah Amalia Nurdin selaku Pranata Keuangan APBN terampil, mengemukakan bahwa:

⁵³ Suparno Pani, Kepala Badan Pusat Statistik Parepare, wawancara di Parepare 17 November 2023.

“Penerapan standar Akuntansi SAP berbasis Akruwal pada kantor kami (BPS Parepare) telah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan pedoman SAP berbasis Akruwal tentunya”.⁵⁴

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara diatas bahwa pada badan pusat statistik (BPS) Parepare. Telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintah berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, memiliki beberapa komponen laporan keuangan, yang dimana hal tersebut dijadikan sebagai alat ukur dalam melihat kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintah. hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Suparno Pani, dalam wawancara penelitian Sebagai berikut.

“Dalam menyusun laporan keuangan, demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas maka kami sajikan laporan keuangan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dan tidak terlepas dari sikap relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami kepada pengguna itu sendiri atau pemeriksa laporan keuangan”.⁵⁵

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber yakni kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare. Dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, yaitu senantiasa berpedoman pada PP No. 71 Tahun 2010. Dan senantiasa menerapkan sikap relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangannya, karena laporan keuangan yang berkualitas ketika telah memenuhi beberapa ciri-ciri, yakni sebagai berikut.

⁵⁴ Fitrah Amalia Nurdin, Pranata Keuangan APBN terampil BPS Parepare, wawancara di Parepare 17 November 2023

⁵⁵ Suparno Pani, Kepala Badan Pusat Statistik Parepare, wawancara di Parepare 17 November 2023.

1. Relevan

Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare memberikan informasi yang baik dan benar dalam menambah dan mengurangi anggaran dana. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Fajrin Thamrin, selaku bendahara pengeluaran:

“Dalam sistem laporan keuangan memang harus memberikan informasi yang relevan apalagi ini berkaitan dengan penggunaan laporan keuangan, di kantor kami, Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare ini menyusun dengan baik pada setiap anggaran yang dikeluarkan, dan sangat memperhatikan relevansi laporan tersebut, serta penjelasan atas laporan keuangan yang lebih rinci dan jelas, sehingga manfaat untuk kinerja kedepannya bisa lebih baik dan bermanfaat.”⁵⁶

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh bapak Fajrin Thamrin, hal ini sejalan dengan relevansi laporan keuangan yang dapat memberikan manfaat dan memprediksi kondisi laporan keuangan di masa yang akan datang. Laporan keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu karena nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Sabriah Amir, selaku Kasubag Umum:

“Sebagai kasubag umum, saya berusaha selalu memberikan informasi laporan keuangan yang lebih baik untuk kedepannya agar lebih bermanfaat kepada para pemakai laporan keuangan, dengan Menggunakan biaya sesuai dengan peruntukannya.”⁵⁷

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber Kasubag Umum, dalam hal ini Ibu Sabriah Amir, setiap proses kegiatan yang menggunakan

⁵⁶ Fajrin Thamrin, bendahara pengeluaran Badan Pusat Statistik Parepare, wawancara di Parepare 21 November 2023.

⁵⁷ Sabriah Amir, Kasubag Umum Badan Pusat Statistik Parepare, wawancara di Parepare 17 November 2023.

anggaran segera mungkin dilaporkan dan disajikan sesuai dengan peruntukannya dengan tepat waktu.

2. Andal (*Reliability*)

Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare menyajikan informasi laporan keuangan yang berdasarkan pada pedoman akuntansi pemerintahan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang memuat informasi yang dapat diandalkan dan tidak mengandung unsur manipulatif. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Fitrah Amalia Nurdin selaku Pranata Keuangan APBN terampil:

“Pada kantor kami Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare melakukan pencatatan/perekaman transaksi yang telah dilakukan/ atau yang akan dilakukan dengan menyajikan informasi yang jujur dan bukti-bukti yang nyata dan dapat diverifikasi dalam bentuk penyajiannya.”⁵⁸

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa saat melakukan pencatatan transaksi pelaporan keuangan sangat memperhatikan kejujuran dan bukti-bukti yang kuat agar lebih transparan dan tidak memihak kepada siapapun dalam artian netral.

3. Dapat dibandingkan (*Comprobility*)

Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare dalam menyusun laporan keuangan, dikerjakan dengan sistem LPJ dan dapat dibandingkan kinerjanya dengan laporan keuangan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Fajrin Thamrin selaku bendahara pengeluaran, pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare bahwa:

⁵⁸ Fitrah Amalia Nurdin, Pranata Keuangan APBN Terampil Badan Pusat Statistik Parepare, wawancara di Parepare 17 November 2023.

“Pelaporan keuangan pada kantor kami Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, sejauh ini selalu berjalan dengan baik, dan sesuai dengan SAP berbasis Akruwal tentunya, berkat lancarnya sistem pelaporan ini dapat dilihat dari tahun ke tahun, yang mana dapat diakses baik dalam bentuk buku maupun softfile.”⁵⁹

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh oleh narasumber yakni bapak Fajrin Thamrin selaku bendahara pengeluaran kepada peneliti, bahwa adanya sistem laporan keuangan yang baik dan jujur sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan, yakni SAP berbasis Akruwal. Serta pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengakses laporan tersebut, baik dalam bentuk buku maupun softfile, sehingga dapat membandingkan laporan keuangan lebih mudah.

4. Dapat dipahami (*understandability*)

Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare dalam pelaporan keuangan, dapat dengan mudah dipahami, karena laporan keuangan dapat diakses baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk softfile. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Fitra Amalia Nurdin, selaku Pranata Keuangan APBN Terampil pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare kepada peneliti, yakni:

“Informasi laporan keuangan pada kantor kami, dipublikasikan kepada semua orang-orang yang berkepentingan, dalam bentuk buku maupun softfile, namun tidak pernah di publikasikan di website kantor kami. Sehingga memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh para pengguna.”⁶⁰

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber yakni, Fitrah Amalia Nurdin, selaku Pranata Keuangan APBN Terampil pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare kepada peneliti. Bahwa informasi laporan keuangan dapat dipahami kepada semua orang-orang yang berkepentingan, yang mana dapat

⁵⁹ Fajrin Thamrin, Bendahara Pengeluaran Badan Pusat Statistik Parepare, wawancara di Parepare 21 November 2023.

⁶⁰ Fitrah Amalia Nurdin, Pranata Keuangan APBN terampil Badan Pusat Statistik Parepare, wawancara di Parepare 17 November 2023.

diakses, baik melalui buku laporan keuangan maupun dalam bentuk softfile. Sehingga memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh para pengguna.

Dalam penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentunya, akan mengalami manfaat maupun perkembangan, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Fitrah Amalia Nurdin, selaku Pranata Keuangan APBN pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, sebagai berikut:

“Dengan penerapan SAP berbasis Akrual ini, memberikan kami gambaran riil dari kondisi keuangan satuan kerja sehingga dapat lebih baik lagi dalam pelaksanaan anggaran kedepannya.”⁶¹

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sabriah Amir selaku Kasubag Umum pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, yakni sebagai berikut:

“Dengan diberlakukannya SAP berbasis Akrual ini, maka dapat memberikan informasi tentang gambaran keuangan secara menyeluruh dan merupakan evaluasi kinerja pemerintah terkait pengelolaan keuangan.”⁶²

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber yakni Fitrah Amalia Nurdin, dan ibu Sabriah Amir kepada peneliti bahwa, bahwa manfaat maupun perkembangan yang diperoleh atas penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual ini yakni, memberikan gambaran kondisi keuangan secara menyeluruh, serta menjadi evaluasi kinerja pemerintah terkait pengelolaan keuangan, sehingga akan lebih baik dalam pengelolaan keuangan kedepannya.

⁶¹ Fitrah Amalia Nurdin, Pranata Keuangan APBN terampil Badan Pusat Statistik Parepare, wawancara di Parepare 17 November 2023.

⁶² Sabriah Amir, Kasubag Umum Badan Pusat Statistik Parepare, wawancara di Parepare 17 November 2023.

Namun, Penerapan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 atau yang disebut dengan SAP berbasis Akruwal tidak lepas dari suatu kendala-kendala tertentu, baik faktor sumber daya manusia, latar belakang pendidikan staf keuangan maupun pelatihan staf keuangan yang bisa menghambat penerapan standar akuntansi pemerintah apabila sumber daya manusia tidak kompeten dan handal dibidang akuntansi, kemudian faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi berupa *Hardware* dan *software* yang kurang memadai dalam penerapan SAP, Serta kekeliruan terhadap pencatatan pelaoran keuangan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Fajrin Thamrin, selaku bendahara pengeluaran pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, sebagai berikut:

“Untuk SDM pada kantor kami, yah bisa dibilang sudah kompeten dan handal pada bidangnya masing-masing, terkhusus pada bidang akuntansi/keuangan itu sendiri. Selain itu, sarana prasana juga sudah cukup memadai dalam mendukung SAP berbasis Akruwal ini. Namun kendala yang terkadang kami alami pada kantor kami, yakni Perhitungan yang kadang keliru akibat pembayaran utang pihak ketiga yang terlambat.”⁶³

Berdasarkan pernyataan diatas yang disampaikan oleh bapak Fajrin Thamrin selaku bendahara pengeluaran pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare kepada peneliti, bahwa pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, untuk sumber daya manusia terkhusus pada bidang akuntansi/keuangan sudah kompeten dan handal dalam bidangnya masing-masing. Selain itu, untuk sarana dan prasarana dalam hal ini kualitas teknologi informasi berupa *Hardware* dan *software* sudah cukup memadai. Sehingga hal ini dapat mendukung atas penerapan standar akuntansi berbasis akruwal itu sendiri. Namun, hal yang menjadi kendala pada Badan Pusat Statistik (BPS)

⁶³ Fajrin Thamrin, Bendahara Pengeluaran Badan Pusat Statistik Parepare, wawancara di Parepare 21 November 2023.

Parepare, yakni perhitungan yang kadang keliru, karena diakibatkan oleh pembayaran pihak ketiga yang terlambat.

Berdasarkan data yang diambil pada badan pusat statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare mengenai laporan keuangan yakni, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran BPS Parepare periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022		% terhadap anggaran	31desember 2021 Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
Pendapatan					
Pendaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.299.000	32.492.953	984,93	3.298.968
Jumlah Pendapatan		3.299.000	32.492.953	984,93	3.298.968
Belanja Negara	B.2	7.485.502.000	7.439.411.866	99,38	3.427.551.010
Belanja Pegawai	B.3	2.273.287.000	2.242.471.320	98,64	1.977.917.010
Belanja Barang	B.4	5.212.215.000	5.196.940.546	99,71	1.353.940.500
Belanja Modal	B.5	0	0	0,00	95.693.500
Jumlah Belanja		7.485.502.000	7.439.411.866	99,38	3.427.551.010

Sumber data : Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Parepare tahun 2022

Tabel 4.2 Neraca Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	11.219.178	0
Persediaan	C.2	121.033.973	63.865.188
Jumlah Aset Lancar		132.253.151	63.865.188
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.3	1.792.687.000	1.792.687.000
Peralatan Dan Mesin	C.4	1.711.686.254	1.691.236.254
Gedung Dan Bangunan	C.5	2.708.554.000	2.708.554.000
Aset Tetap Lainnya	C.6	36.121.448	32.112.984
Akumulasi Penyusutan	C.7	(1.874.928.248)	(1.681.785.798)
Jumlah Aset Tetap		4.374.120.454	4.542.804.440
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	12.850.000	12.850.000
Aset Lain-lain	C.9	1.606.290	1.556.290
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.10	(12.800.040)	(9.587.540)
Jumlah Aset Lainnya		1.656.250	4.818.750
JUMLAH ASET		4.508.029.855	4.611.488.378
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	82.777.361	80.412.717
JUMLAH KEWAJIBAN		82.777.361	80.412.717
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	4.425.252.494	4.531.075.661
JUMLAH EKUITAS		4.425.252.494	4.531.075.661
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.508.029.855	4.611.488.378

Sumber data : Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Parepare tahun 2022

Tabel 4.3 Laporan Operasional Periode Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	2.252.953	3.298.968
JUMLAH PENDAPATAN		2.252.953	3.298.968
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.243.173.574	1.981.465.325
Beban Persediaan	D.3	102.318.319	86.588.920
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.519.087.330	1.093.530.724
Beban Pemeliharaan	D.5	118.396.085	96.286.798
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.420.810.079	131.044.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	196.354.950	228.225.470
JUMLAH BEBAN		7.600.140.337	3.617.141.237
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL			
		(7.597.887.384)	(3.613.842.269)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0	0
		0	1.181.250
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		30.240.000	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		30.240.000	(1.181.250)
SURPLUS/DEFISIT		(7.567.647.384)	(3.615.023.519)

Sumber data : Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Parepare tahun 2022

Tabel 4.4 Laporan Perubahan Ekuitas Periode Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	31 desember 2022	31 desember 2021
Ekuitas awal	E.1	4.531.075.661	4.710.229.016
Surplus/defisit-LO	E.2	(7.567.647.384)	(3.615.023.519)
Koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas	E.3	0	970.000
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	0	970.000
Transaksi Antar Entitas	E.4	7.461.824.217	3.434.900.164
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	7.406.918.913	3.424.252.042
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	54.905.304	10.648.122
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(105.823.167)	(179.153.355)
Ekuitas Akhir	E.5	4.425.252.494	4.531.075.661

Sumber data : Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Parepare tahun 2022

2. Penerapan Akuntansi Syariah pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare

Akuntansi syariah baik dalam bentuk teoritis maupun praktis harus selalu mengacu pada ketentuan yang bersumber dari hukum islam. Sumber hukum islam dijadikan sebagai rujukan dalam akuntansi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis. Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi dan pelaporan untuk mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yakni, tidak mengandung riba, masyir (judi), gharar (penipuan), dan zhulum (kezaliman).

Pada umumnya prinsip yang berhubungan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat seperti pertanggungjawaban, kebenaran dan keadilan sangat penting dikarena kebebasan tanpa batas meruakan sesuatu yang mustahil dilakukan manusia dikarena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban, dalam memenuhi tuntutan tersebut manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Dalam konteks ini kebenaran dan keadilan mengandung dua unsur kebajikan dan kebenaran yang dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar.

Dalam akuntansi Syariah terdapat 3 prinsip yaitu:

a. Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban merupakan suatu konsep yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat muslim tentunya. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Karena bagi kaum muslimin, persoalan amanah adalah hasil transaksi manusia dengan Sang Kholiq mulai dari alam kandungan hingga ia kembali lagi pada-Nya.

Dalam hal ini pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare merupakan suatu bentuk pelaporan keuangan yang dilakukan kepada pemerintah dengan mengirim laporan keuangan tersebut kepada pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Sabriah Amir selaku Kasubag Umum:

“Untuk semua laporan kami senantiasa merujuk pada PP No. 71 Tahun 2010 dan senantiasa menerapkan PSAP 01 hingga PSAP 12 sehingga kami dapat mempertanggung jawabkan pencatatan dan laporan keuangan tersebut, dan kami menjaga pertanggungjawaban dengan sangat taat, baik dari segi asas maupun aturan.”⁶⁴

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber yakni Ibu Sabriah Amir selaku Kasubag umum kepada peneliti bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare telah melakukan pertanggungjawaban atas setiap pelaporannya, hal ini dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban dalam pembukuan laporan keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare itu sendiri.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Bapak Fajrin Thamrin selaku bendahara pengeluaran pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare:

“Laporan keuangan yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare ini sudah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban karena dalam setiap kegiatannya itu pasti melakukan pelaporan secara tersusun.”⁶⁵

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan, jika ditafsirkan lebih lanjut, surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis,

⁶⁴ Sabriah Amir, Kasubag Umum Badan Pusat Statistik Parepare, wawancara di Parepare 17 November 2023.

⁶⁵ Fajrin Thamrin, Bendahara Pengeluaran Badan Pusat Statistik Parepare, wawancara di Parepare 21 November 2023.

tetapi juga merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia. Keadilan dalam konteks aplikasi dalam akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu:

Pertama: Berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan pengguna laporan keuangan, atau pihak-pihak tertentu.

Kedua: Kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/ syariah dan moral). Hal ini, Seperti apa yang dikatakan oleh Fitrah Amalia Nurdin selaku Pranata Keuangan APBN terampil dalam wawancara penelitian, sebagai berikut:

“Dalam pencatatan laporan keuangan, tentu telah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, karena hasil laporan keuangan akan melalui pemeriksaan Inspektorat jadi kami harus jujur dan mengikuti aturan yang berlaku.”⁶⁶

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber yakni Fitrah Amalia Nurdin selaku Pranata Keuangan APBN terampil kepada peneliti bahwa dalam pencatatan laporan keuangan, harus disesuaikan dengan jumlah yang sebenarnya, jujur serta mengikuti aturan yang berlaku.

c. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran sangat berkaitan dengan prinsip keadilan. Apabila seseorang melakukan keadilan, maka sudah dipastikan orang tersebut melakukan kebenaran. Seorang akuntan akan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi dengan adil dan jujur, hasil yang dilaporkannya akan benar dan baik. Di sinilah letak keberhasilan suatu akuntansi syariah. Implementasi prinsip kebenaran tidaklah

⁶⁶ Fitrah Amalia Nurdin, Pranata Keuangan APBN terampil Badan Pusat Statistik Parepare, wawancara di Parepare 17 November 2023.

lepas dari pertanggungjawaban dimana kita untuk mengukur kebenaran itu maka perlu pertanggungjawaban dan keadilan salah satunya dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan yang diungkaplan oleh Fitrah Amalia Nurdin selaku Pranata Keuangan APBN terampil dalam wawancara penelitian, sebagai berikut:

“Dalam menanamkan prinsip kebenaran, maka setiap ada kegiatan sebagai selaku pengelola keuangan maka kami memiliki catatan setiap pengeluaran atau dokumentasi sebagai bukti-bukti untuk pencatatan laporan keuangan.”⁶⁷

Hal selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Sabriah Amir selaku kasubag umum pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, sabagai berikut.

“Dalam pencatatan laporan keuangan, maka kami senantiasa mencatat laporan keuangan tersebut dengan sebenar-benarnya dan sesuai dengan peruntukannya, dan untuk laporan keuangan tersebut, kami sajikan dalam bentuk buku laporan keuangan serta bentuk softfile, untuk pengguna laporan keuangan itu sendiri maupun pihak-pihak yang berkepentingan.”⁶⁸

Mendengar apa yang disampaikan narasumber yakni Fitrah Amalia Nurdin dan Ibu Sabriah Amir, bahwa pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare dalam melakukan pelaporan, setiap kegiatannya melakukan pencatatan laporan keuangan, dokumentasi dan lain-lain dengan tujuan laporan tersebut dapat dilihat kebenarannya dan kejujuran dalam melakukan pelaporan keuangan.

⁶⁷ Fitrah Amalia Nurdin, Pranata Keuangan APBN terampil Badan Pusat Statistik Parepare, wawancara di Parepare 17 November 2023.

⁶⁸ Sabriah Amir, Kasubag Umum Badan Pusat Statistik Parepare, wawancara di Parepare 17 November 2023.

Berikut merupakan contoh penerapan Akuntansi Syariah dalam laporan dan pencatatan akuntansi pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare.

a. Pendapatan Negara bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.492.953 atau mencapai 984,93 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.299.000. Rincian Pendapatan BPS Kota Pare-Pare sebagai berikut:

Tabel 4.5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan penerimaan Klaim Asuransi BMN	3.299.000	2.252.953	0
Pendapatan Lain-lain	0	30.240.000	0
Jumlah	3.299.000	32.240.000	0

Sumber data : Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Parepare tahun 2022

Tabel 4.6 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.252.953	3.298.968	(31,71)
Pendapatan lain-lain	30.240.000	0	0,00
Jumlah	32.492.953	3.298.968	884,94

Sumber data : Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Parepare tahun 2022

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 884,94 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2021.

Hal tersebut disebabkan adanya penurunan pendapatan sewa rumah mulai bulan Juni 2022 menjadi Rp. 126,031,- dimana sebelumnya sebesar Rp. 274.914,- Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 73.030.1024/BPS/7300/01/2022 Tentang Tarif Sewa Rumah Negara Golongan I di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 per Tanggal 03 Januari 2022

b. Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.7.439.411.866 atau 99,38 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 7.485.502.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2022

Uraian	2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	2.273.287.000	2.242.471.320	98,64
Belanja Barang	5.212.215.000	5.196.940.546	99,71
Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Neto	7.485.502.000	7.439.411.866	99,38

Sumber data : Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Parepare tahun 2022

Realisasi Belanja BPS Kota Parepare Tahun Anggaran 2022 sebesar 99,38 persen telah mencapai target yang ditetapkan oleh BPS Republik Indonesia sebesar 98 persen. Dengan pencapaian realisasi tersebut BPS Kota Parepare berhasil mendapatkan capain kinerja sebesar 104,96 persen.

Tabel 4.8 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	2.270.921.326	1.979.411.819	14,73
Belanja Barang	5.200.675.046	1.356.062.500	283,51
Belanja Modal	0	95.693.500	(100,00)
Jumlah Bruto	7.471.596.372	3.431.167.819	117,76
Pengembalian Belanja	32.184.506	3.616.809	789,86
Jumlah	7.439.411.866	3.427.551.010	117,05

Sumber data : Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Parepare tahun 2022

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 117,05 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2021.

Adanya peningkatan belanja pegawai sebesar 14,73% disebabkan adanya penambahan pegawai jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Peningkatan belanja barang sebesar 283,51% disebabkan adanya kegiatan besar yaitu registrasi sosial dan ekonomi (Regsosek) dan Survei Biaya Hidup (SBH). Penurunan pada belanja modal dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

c. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.242.471.320 dan Rp1.977.917.010. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 4.9 Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.147.043.438	1.051.115.461	9,13
Belanja Lembur	80.008.000	21.902.000	265,30
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.043.869.888	906.394.358	15,17
Jumlah Bruto	2.270.921.326	1.979.411.819	14,73
Pengembalian Belanja	28.450.006	1.494.809	1.803,25
Jumlah	2.242.471.320	1.977.917.010	16,08

Sumber data : Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Parepare tahun 2022

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 16,08 persen dari 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- 1) Adanya Kenaikan Gaji Berkala (KGB) untuk Pegawai di BPS Kota Parepare
- 2) Adanya penambahan pegawai sebanyak 2 orang di BPS Kota Parepare
- 3) Adanya pelatihan Pejabat Fungsional Statistisi Ahli sebanyak 2 orang yang menyebabkan meningkatnya tunjangan fungsional yang harus diterima.
- 4) Selain itu adanya peningkatan belanja lembur, dimana pada tahun 2021 terdapat pengurangan belanja lembur, sedangkan pada tahun 2022 lembur dapat dilaksanakan sesuai dengan persetujuan Kepala BPS Kota Parepare dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.
- 5) Pada tahun 2022, pembayaran gaji 13 dan THR masih mengikuti peraturan di tahun 2021 sesuai dengan PP No 63 Tahun 2021 dimana THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada PNS terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.

d. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.196.940.546 dan Rp1.353.940.500.

Tabel 4.10 Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	355.394.370	355.957.628	(0,16)
Belanja Barang Non Operasional	3.085.387.918	635.161.250	385,76
Belanja Persediaan	114.412.050	31.340.000	265,07
Belanja Jasa	104.854.544	105.646.824	(0,75)
Belanja Pemeliharaan	118.396.085	96.272.798	22,98
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.422.230.079	131.684.000	283,51
Jumlah Bruto	3.734.500	2.122.000	283,51
Pengembalian Belanja	5.200.675.046	1.356.062.500	283,51
Jumlah	3.734.500	2.122.000	283,19

Sumber data : Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Parepare tahun 2022

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 283,19 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021.

Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- 1) Adanya kegiatan Regsosek dan SBH yang menyebabkan adanya kenaikan belanja barang persediaan sebesar 265,07% dan belanja barang non operasional sebesar 385,76%
- 2) Adanya belanja pemeliharaan yang berupa service beberapa unit laptop dan pembelian UPS komputer sebesar 22,98%
- 3) Adanya belanja perjalanan dalam negeri sebesar 980,03% disebabkan dari konsultasi data dan kegiatan Regsosek dan SBH

e. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp95.693.500. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 4.11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	95.693.500	(100,00)
Jumlah Bruto	0	95.693.500	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah Bruto	0	95.693.500	(100,00)

Sumber data : Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Parepare tahun 2022

Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan pada 31 Desember 2022 sebesar 100,00 persen dibandingkan 31 Desember 2021 disebabkan oleh, tidak adanya pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, sehingga keputusan penghapusan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai dari tahun 2015. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 Ayat 8 bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual merupakan standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Rata-rata pengelola keuangan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, ketika dipertanyakan tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Mereka sudah matang akan makna dari basis akrual itu sendiri dan melibatkan seluruh pegawai dalam proses implementasi SAP berbasis Akrua mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, peneliti menemukan bahwa BPS Parepare dalam menyusun laporan keuangan senantiasa menerapkan PP No. 71 Tahun 2010. Mulai dari PSAP 01 hingga PSAP 12. Serta memperhatikan relevansi serta manfaat ketepatan waktu agar laporan keuangan tersebut dapat disajikan jauh lebih baik dan berkualitas bagi para pengguna.

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seuruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.⁶⁹

Bagian-bagian laporan keuangan yang terdapat dalam standar akuntansi pemerintah yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare :

1. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2. Neraca mencantumkan pos-pos berikut :
 - a. Kas dan setara kas
 - b. Investasi jangka pendek
 - c. Piutang pajak dan bukan pajak
 - d. Persediaan
 - e. Investasi jangka panjang

⁶⁹ Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Grasindo, 2016). hal. 3

- f. Aset tetap
 - g. Kewajiban jangka pendek
 - h. Kewajiban jangka panjang
 - i. Ekuitas
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare yang kemudian dibandingkan dengan anggaran.
4. Laporan realisasi anggaran mencantumkan pos-pos berikut :
- a. Pendapatan LRA
 - b. Belanja
 - c. Transfer
 - d. Pembiayaan
 - e. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
5. Laporan Operasional (LO)
- LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- Laporan operasional mencantumkan pos-pos berikut :
- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
 - b. Beban dari kegiatan operasional
 - c. Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional, bila ada
 - d. Pos luar biasa, bila ada
 - e. Surplus/defisit-LO

6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK menyediakan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan segenap pegawai pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, dalam pencatatan laporan keuangan, senantiasa menerapkan PSAP 01 hingga PSAP 12. Dan setiap pencatatan memiliki bukti atas laporannya seperti dokumentasi agar laporan tersebut bermanfaat serta memperhatikan relevansinya yakni ketepatan waktu dan menggunakan biaya sesuai dengan peruntukannya.

Selain itu, Badan Pusat statistik (BPS) Parepare terus berupaya menyajikan informasi laporan keuangan yang jujur serta memiliki bukti dokumentasi setiap kegiatan dan pencatatan. Sehingga dengan perilaku tersebut, dapat menghindari dari perilaku manipulatif dalam pencatatan informasi laporan keuangan. pada Badan Pusat statistik (BPS) Parepare, laporan keuangan yang dibuat dari tahun ke tahun dapat dilihat dan dijadikan sebagai perbandingan dari anggaran tahun sebelumnya, sehingga dengan demikian dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau pengguna laporan keuangan dalam melihat kemajuan kinerja tahun berjalan.

Laporan keuangan pada Badan Pusat statistik (BPS) Parepare dapat diakses baik dalam bentuk buku laporan keuangan maupun dalam bentuk softfile. Sehingga dapat memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan, sehingga menghasilkan sistem informasi yang berkualitas.

Hal tersebut selaras dengan teori signal bahwa informasi asimetris antara informasi yang berasal dari manajemen dan informasi yang berasal dari pemegang saham. Sehingga manajemen akan memberikan informasi kepada investor atau pemegang saham ketika mendapatkan informasi yang baik yang berkaitan dengan perusahaan seperti peningkatan nilai perusahaan. Manajemen perusahaan yang didasari motivasi signalling yang berkaitan dengan pembagian dividen merupakan harapan bahwa kinerja perusahaan dapat memberikan sinyal positif terhadap suatu investasi. Sinyal ini akan membawa para investor untuk melakukan investasi melalui pembelian saham perusahaan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi sifat relevan (*relevance*), keandalan (*reliability*), dapat diperbandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*). Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.⁷⁰

Indikator karakteristik laporan keuangan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 4.12 Indikator karakteristik kualitas laporan Keuangan

Indikator	Evaluasi	Keterangan
Relevan	Sudah Sesuai	Memberikan manfaat untuk memprediksi, mengevaluasi kinerja masa lalu, dan dipublikasikan tepat waktu.
Andal	Sudah sesuai	Disajikan seacara jujur, dapat diverifikasi kebenarannya, netral dalam artian tidak memihak kepada kelompok tertentu.
Dapat Dibandingkan	Sudah Sesuai	Dapat dibandingkan kinerjanya dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
Dapat Dipahami	Sudah Sesuai	Memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh para pengguna.

Sumber data : data diolah

2. Penerapan Akuntansi Syariah pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, berdasarkan perspektif syariah, Standar Akuntansi Pemerintah yang

⁷⁰ SAP Standar Akuntansi Pemerintah (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007). hal. 31-33

dilaksanakan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, kebenaran dan keadilan.

a. Prinsip pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban diartikan sebagai sebuah keharusan untuk menanggung dan menjawab dalam artian keharusan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Prinsip pertanggungjawaban ini berkaitan atau berimplikasi secara langsung dengan konsep amanah dimana dalam bisnis dan akuntansi individu yang terlibat langsung harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dalam bentuk laporan keuangan ataupun laporan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, ditinjau dari prinsip pertanggungjawaban, dalam melaporkan dan mencatat laporan keuangan semua kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya dan sesuai dengan peruntukannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. di dalam kitab suci Al-Qur'an surah Al-Mudazzir (74) Ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya :

Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya.⁷¹

⁷¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, (Bandung: Marwah, 2009), h.576.

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diperbuat agar kiranya mempertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukan. Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare dalam hal ini, telah mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan yang mengenai anggaran dan kegiatan yang terkait.

Pengembangan pertanggungjawaban dalam islam telah hadir dalam konsep kehidupan secara islami yaitu manusia dalam eksistensinya harus didukung oleh ketiga komponen yaitu kehadiran Tuhan, manusia dan Alam. Tuhan sebagai kausa prima dalam ilmu filsafat menjadikannya sebagai pusat pertanggungjawaban puncak, manusia meruakan hubungan horisontal antar sesama hamba dimuka bumi ini sedangkan alam disini yang menjadi pijakan dalam mengolah dan beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dunia bisnis yang sepatutnya dibangun dengan epistemologi berpasangan, dan egoistik-altruistik, material-sritual dan individu-jama'ah. Konsekuensi keseimbangan ini menyebabkan SET memiliki kepedulian pada *stakeholders* yang luas, yaitu Allah, Manusia dan Alam. Dengan keterkaitan ketiga elemen ini maka akan mampu untuk membentuk pertanggungjawaban yang jauh lebih baik. Ketiga aspek dalam trilogi akuntabilitas merupakan suatu kesatuan (*manunggaling*) yang tak terpisahkan dan memiliki keterkaitan yang erat.⁷²

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah pengakuan dan perlakuan antara hak dan kewajiban. Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan

⁷² Saddam Husain dan Wahyuddin Abdullah, "Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah ditinjau dari Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus pada PT. BNI Syariah Cabang Makassar)," *Jurnal Iqtisaduna*, Volume 1 (2015) hal. 54.

sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks akuntansi syariah keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika dan syariah. Secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.⁷³

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan segenap pegawai pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, bahwa dalam pelaporan keuangan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare dipertanggungjawabkan sesuai dengan realisasi anggaran dan laporan kinerja yang ada. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare dalam pencatatan laporan keuangan telah menerapkan prinsip keadilan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl/16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah Swt. menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁷⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah berlaku adil dengan berbuat kebajikan dengan semua makhluk dan menghindari segala macam

⁷³ Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentitas di Teangah Kegalaun*, (Jakarta, PSAP, 2004), hal.173

⁷⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: Marwah, 2009), h.277.

perbuatan yang dapat menimbulkan perdebatan dan permusuhan. Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare dalam hal ini mengimplementasikan prinsip keadilan dalam pencatatan laporan keuangan. Dan tidak merekayasa anggaran-anggaran seperti menambahkan harga dalam membelanjakan anggaran dan merekayasa catatan-catatan. Hal ini membuktikan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare berpegang teguh pada prinsip-prinsip akuntansi syariah.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah merupakan kesesuaian antara apa yang dicatat dengan apa yang dilaporkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Termasuk dalam prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, beban, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntansi dalam praktik wajib mengukur semuanya dengan tanggung jawab, benar dan adil berdasarkan bukti yang ada dalam sebuah organisasi tersebut.⁷⁵ Seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare dimana hal yang dicatat dan dilaporkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan menyertakan bukti-bukti dokumentasi kegiatan dan catatan laporan keuangan dan dibuktikan dengan keterbukaannya dalam memberikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk buku laporan keuangan maupun dalam bentuk softfile. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Q.S.Al-Anfal/8: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁷⁵ Lantip Susiolowati, *Tanggungjawab, keadilan dan kebenaran Akuntansi Syariah*, Jurnal An-Nisbah Vol.03, No.02' hal .303-3405

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah swt. Dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁷⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam Islam menerapkan prinsip amanat dan pertanggungjawaban dapat dilihat sebagai fitrah kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah swt. Dan bersifat adil dengan segala sesuatu sehingga terbentuknya pertanggung jawaban kita karena telah siap dilahirkan ke dunia ini.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bersyukur adalah sebuah keharusan, sebab aneka nikmat tersebut bersumber dari Allah. Tidak bersyukur berarti mengkhianati nikmat tersebut dari Pemberinya, karena itu Allah menyatakan, “Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu mengkhianati, yakni mengurangi sedikit pun hak Allah sehingga mengkufurinya atau tidak mensyukurinya, dan juga jangan mengkhianati Rasul, yakni Nabi Muhammad, tetapi penuhilah seruannya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu oleh siapa pun, baik amanat itu adalah amanat orang lain maupun keluarga; seperti istri dan anak, muslim atau non-muslim, sedang kamu mengetahui bahwa itu adalah amanat yang harus dijaga dan dipelihara.” Segala sesuatu yang berada dalam genggamannya manusia adalah amanat Allah yang harus dijaga dan dipelihara.

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, (Bandung: Marwah, 2009), hal.180.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Ayu Frihatni, Nirwana, Syamsuddin Tahun 2021, dengan judul penelitian “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare”, menunjukkan hasil penelitian, mengungkapkan bahwa dalam transparansi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, publikasi laporan keuangan dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik yang dapat diakses oleh semua orang. Pada laporan keuangan yang dipublikasi tersebut mencakup pengungkapan terhadap kondisi keuangan Parepare dan juga realisasi terhadap anggaran yang telah disahkan dalam APBD. Selain itu, dalam penyusunan anggarannya pemerintah Kota Parepare juga melibatkan masyarakat melalui Musrenbang dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Dalam menyelenggarakan akuntabilitas juga tidak lepas dari standar kinerja, dimana keberhasilan kinerja dalam merealisasikan pelayanan masyarakat didasarkan pada indikator-indikator yang termuat dalam rencana kerja yang tentunya sesuai antara anggaran dan kerja yang dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini selaras dengan Penelitian ini, bahwa pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, senantiasa menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Serta publikasi laporan keuangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk buku laporan keuangan, maupun dalam bentuk soft file.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas terkait dengan Penerapan Standar Akuntansi Pada Badan Pusat Statistik Parepare (Analisis Akuntansi Syariah). Maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan keuangan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare telah disajikan dengan baik, dimana Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare telah menyusun laporan keuangan yang akuntabel atau sudah benar, dan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare telah memenuhi kriteria Kualitas Laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
2. Penerapan Standar akuntansi pemerintahan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare telah diterapkan sepenuhnya karena telah memenuhi dan melaksanakan setiap komponen laporan keuangan, mulai dari PSAP 01 hingga PSAP 12 berdasarkan dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu, SDM pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare telah kompeten pada bidangnya masing-masing. Serta sarana dan prasarana juga sudah cukup memadai dalam mendukung SAP berbasis Akrual ini.
3. Ditinjau dari penerapan prinsip akuntansi syariah Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare telah menerapkan prinsip akuntansi syariah, yakni prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran dimana dalam melaporkan keuangan pegawai pada Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare melaporkan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

B. SARAN

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik eksternal maupun internal dan lebih mempermudah kebutuhan-kebutuhan kantor agar lebih memadai dalam pelaksanaan program kegiatan.
2. Studi yang dilakukan peneliti masih memiliki banyak kekurangan, maka peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan sudut pandang atau objek yang berbeda. Sehingga pemahaman dan wawasan dapat bertambah mengenai Akuntansi Sektor Publik.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa membandingkan laporan keuangan berbasis kas dan laporan keuangan berbasis akrual, serta menganalisis apa saja yang menjadi pembeda dari 2 jenis laporan keuangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdullah, Ade Gafar, Asep Bayu Nandiyanto, Badri Munir Sukoco, Nidya Ayu Arina, Rahmat Heru Setianto, dan Ratih Hurriyati, *Increasing Management Relevance and Competitiveness* (CRC Press, 2018)
- Amane, Ade Putra Ode, Indra Kertati, Dwi Hastuti, Rahmad Purwanto, Lukman Jakfar Shodik, dan Mohammad Ridho'i, *Metode Penelitian Kualitatif (Perspektif Bidang Ilmu Sosial)*, ed. oleh Efitra dan Sepriono (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- As-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 1* (Gema Insani, 2013)
- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, ed. oleh Suryadi Saat dan Yati Sumiharti (Penerbit Erlangga, 2005)
- Effendi, Syahril, *Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintahan Daerah* (CV Batam Publisher, 2021)
- Fauzi, A, "Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Di Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Serang)," 2019, 56
- Fauziah, Fenty, *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, Dan Nilai Perusahaan Teori Dan Kajian Empiris*, ed. oleh Musa (RV Pustaka Horizon, 2017)
- Frihatni, Andi Ayu, Nirwana, dan Syamsuddin, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4 (2021)
- Furywardhana, Firdaus, *Akuntansi Syariah di lembaga keuangan syariah* (Guepedia, 2011)
- Halim, Abdul, *akuntansi keuangan daerah* (Salemba Empat, 2008)
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik*, ed. oleh Ema Sri Suharsi (Salemba Empat), Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi, *akuntansi sektor publik*, ed. oleh Ema Sri Suharsi (Salemba Empat, 2013), 2013)
- Hamta, Firdaus, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Deepublish, 2015)
- Hantano, Lakharis Inuzula, Sri Apriyanti Husain, Anny Widiasmara, Umi Rahma Dhany, Siswadi Sululing, dkk., *Akuntansi sektor publik*, ed. oleh Syaiful Bahri (CV. Media sains indonesia, 2021)

- Herlina, Hetti, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010,” *Jurnal Akuntansi*, 1.3 (2013)
- Hermawan, Alisha Ristanti, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah kota Kediri periode 2017-2020,” *Jurnal ilmiah multi disiplin Indonesia*, 2022
- Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Grasindo, 2016)
- Hidayat, Syahrijal, *Akuntansi pemerintahan*, ed. oleh Anita Safitri Nasution (PT Inovasi Pratama Internasional, 2021)
- Husain, Saddam, dan Wahyuddin Abdullah, “Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah ditinjau dari Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus pada PT. BNI Syariah Cabang Makassar),” *Jurnal Iqtisaduna*, Volume 1 (2015)
- Jebian, Diana Westi, dan Cindy Getah Trisna June, “Evaluasi penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Kabupaten Manggarai (Studi kasus pada Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Kota Ruteng),” *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 2.2 (2020), 8–15
- Kamal Zubair, Muhammad, Rahmawati, Fikri, Herdah, Buhaerah, dan Muhammad Qadaruddin, *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah berbasis teknologi informasi*, ed. oleh Rahmawati, 2020 ed. (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Khaddafi, Muammar, Saparuddin Siregar, Hendra Harmain, Nurlaila, Muhammad Zaki, dan Dahrani, *Akuntansi Syariah meletakkan nilai-nilai syariah islam dalam ilmu akuntansi*, ed. oleh Arfan Ikhsan (Madenatera, 2016)
- Maleong, Ilexy J., *metodologi penelitian kualitatif* (bandung : remaja rosdakarya, 2004)
- Mardiasmo, *Akuntansi sektor publik* (CV. Andi Offset, 2018)
- Margareta, Weda Ayu, dan Ikhsan Budi Riharjo, “kesiapan instansi pemerintah dalam implementasi standarakuntansi pemerintah berbasis akrual,” *Jurnal ilmu & riset akuntansi*, 2015
- Moenek, Reydonnyzar, Dadang Suwanda, dan Basuki Rachmat, *dasar dasar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual*, ed. oleh yudi rihanto Santoso (PT Remaja Rosadakarya, 2020)
- Mustanir, Ahmad, Agus Hendrayady, Iwan Henri Kusnadi, Putu Eka Purnamaningsih, Bambang Irawan, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, dkk., *Teori Administrasi Publik*, ed. oleh Dian Purnama Sari dan Ari Yanto (Global Eksekutif Teknologi, 2023)
- Nasution, Dito Aditia Darma, *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan*

- dan Penganggaran Keuangan Daerah*), ed. oleh Funky (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019)
- Novita, Windya, *Mendulang Rezeki dengan Bisnis Syar'i* (Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 5 (Salemba Empat, 2023)
- Oktaria, Merisa, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua (Studi pada Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah)," *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 13.2 (2019), 181–99
- Paranaon, Selmita, Tuti Herawati, Yesika Yanuarisa, Meidy Santje Selvy Kantohe, Ernawaty Usman, Ni Made Intan Piliandayani, dkk., *Akuntabilitas kinerja sektor publik*, ed. oleh St. Salmah Sharon (CV. Media Sains Indonesia, 2022)
- Raco, Jozef, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, 2018
- Ritonga, Pandapotan, *Keuangan Negara*, ed. oleh Mhd Arifin (Umsu Press, 2021)
- Runtuwene, S K, dan H Gamaliel, "Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7.4 (2019), 4504–13
- SAP Standar Akuntansi Pemerintah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007)
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2017)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2009)
- Suganda, T. Renald, *Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia* (Puntadewa, 2018)
- Sugiyono, *metode penelitian pendidikan (kuntitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan)*, ed. oleh Apri Nuryanto (Alfabeta, cv, 2019)
- Zainuddin, Masyhuri, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, 2009
- Zulhelmy, dan Suhendi, *Dasar-dasar Akuntansi Islamic View*, ed. oleh Erfan Effendy dan Awliya Afwa (Penerbit Adab, 2021)



LAMPIRAN

1. Surat Keputusan penetapan pembimbing skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1620/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

08 Maret 2023

Yth: 1. Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Pembimbing Utama)
 2. Saddam Husain, S.E., M.Ak. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Reski
 NIM. : 19.2800.049
 Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **30 Januari 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
 PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,
 Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

2. Permohonan izin pelaksanaan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5565/In.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : R E S K I
 Tempat/ Tgl. Lahir : LAINUNGAN, 13 FEBRUARI 2001
 NIM : 19.2800.049
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
 KEUANGAN SYARIAH
 Semester : IX (SEMBILAN)
 Alamat : DUSUN BULO WATTANG, KELURAHAN BULO
 WATTANG, KECAMATAN PANCA RIJANG, KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI BADAN PUSAT
 STATISTIK PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 13 Oktober 2023



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002

3. Rekomendasi penelitian dari DPMPTSP

		SRN IP0000886
PEMERINTAH KOTA PAREPARE		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
<i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN		
Nomor : 886/IP/DPM-PTSP/10/2023		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.		
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.		
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA		
NAMA	: RESKI	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	
ALAMAT	: DSN BULO WATTANG, KAB. SIDENRENG RAPPANG	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI BADAN PUSAT STATISTIK PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)	
LOKASI PENELITIAN	: BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 19 Oktober 2023 s.d 19 November 2023	
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
Dikeluarkan di: Parepare		
Pada Tanggal : 21 Oktober 2023		
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE		
		
Hj. ST. RAHMAM AMIR, ST, MM		
Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)		
NIP : 19741013 200604 2 019		
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



4. Surat selesai meneliti

**KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : B-869/7372/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Parepare, menerangkan bahwa :

Nama : Reski

Alamat : Dsn Bulu Wattang, Kab. Sidenreng Rappang

Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah melakukan penelitian/wawancara/mengambil data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di badan Pusat Statistik Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)**" pada satker BPS Kota Parepare.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Desember 2023
a.n Kepala BPS Kota Parepare
Kasubbag Umum

**SABRIAH, SE**

NIP 19740111 199401 2 001

Jl. Jenderal Sudirman No 66, Parepare, Sulawesi Selatan. Telp. (0421) 22766
Website : <https://pareparekota.bps.go.id/>, E-mail: bps7372@bps.go.id



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

5. Pedoman wawancara



NAMA MAHASISWA : R E S K I
 NIM : 19.2800.049
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
 PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DI
 BADAN PUSAT STATISTIK PAREPARE
 (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Sistem pengelolaan keuangan BPS kota Parepare

1. Apakah visi misi BPS tercantum keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual?
2. Apakah proses implementasi dari tahap perencanaan hingga evaluasi serta perbaikan terhadap penerapan sistem SAP berbasis akrual melibatkan seluruh pegawai?
3. Apakah penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan nilai informasi yang berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami) kepada pengguna?
4. Apakah SDM pada Badan Pusat statistik kota parepare ini memiliki kemampuan yang kompeten dalam mengimplementasikan SAP berbasis Akrual ini?

5. Apakah pimpinan mendorong & terlibat sepenuhnya dalam menjalankan proses implementasi SAP berbasis Akruwal.

B. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pengelolaan keuangan BPS kota Parepare

1. Apakah penerapan SAP berbasis akrual, pada BPS ini telah berjalan dengan baik?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP berbasis akrual di BPS parepare?
3. Kebijakan apa yang dilakukan agar penerapan SAP berbasis Akruwal berjalan sesuai dengan semestinya?
4. Apakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan SAP berbasis akrual dan pertanggungjawaban laporan keuangan telah memadai?
5. Apakah SAP berbasis Akruwal menyebabkan ketidakpastian dan menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan organisasi?

C. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

1. Apa manfaat/perkembangan yang dapat diperoleh terhadap penerapan SAP berbasis Akruwal ini?
2. Upaya-upaya apa yang bapak lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan penerapan SAP berbasis akrual tersebut ?
3. Apakah penerapan SAP berbasis akrual pada BPS telah melakukan pelaporan keuangan secara penuh?
4. Apakah penerapan SAP pada BPS ini, telah memenuhi prinsip keadilan, tanggung jawab, serta kejujuran?
5. Apakah dengan penerapan SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan relevan?

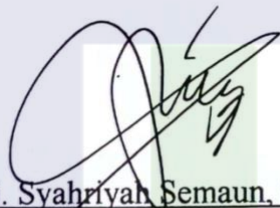
Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 27 September 2023

Mengetahui

Pembimbing Utama

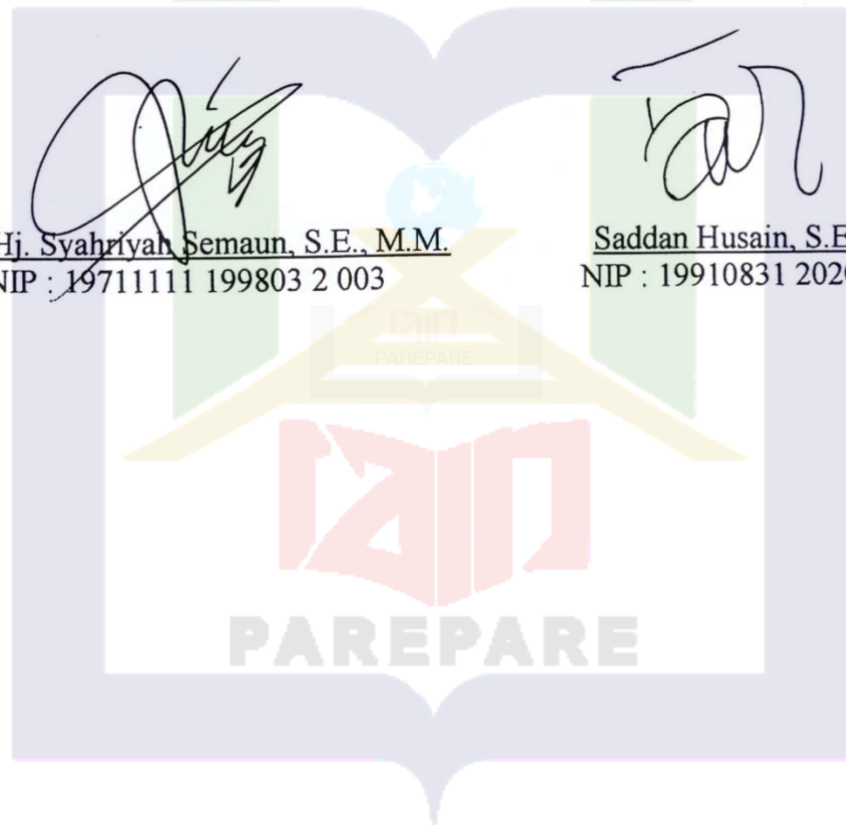
Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP : 19711111 199803 2 003



Saddan Husain, S.E., M.Ak.
NIP : 19910831 202012 1 009



7. Transkrip Wawancara

A. Sistem pengelolaan keuangan BPS kota Parepare

1. Apakah visi misi BPS tercantum keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual?

Jawaban: “Ya”

2. Apakah proses implementasi dari tahap perencanaan hingga evaluasi serta perbaikan terhadap penerapan sistem SAP berbasis akrual melibatkan seluruh pegawai?

Jawaban: “Ya”

3. Apakah penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan nilai informasi yang berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami) kepada pengguna?

Jawaban: “Ya”

4. Apakah SDM pada Badan Pusat statistik kota parepare ini memiliki kemampuan yang kompeten dalam mengimplementasikan SAP berbasis Akrual ini?

Jawaban: “Ya”

6. Apakah pimpinan mendorong & terlibat sepenuhnya dalam menjalankan proses implementasi SAP berbasis Akrual?

Jawaban: “Ya”

B. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pengelolaan keuangan BPS kota Parepare

7. Apakah penerapan SAP berbasis akrual, pada BPS ini telah berjalan dengan baik?

Jawaban: “Dalam penerapan SAP berbasis Akrual ini, yah bisa dibilang cukup baik.”

8. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP berbasis akrual di BPS parepare?

Jawaban: “Ada. Perhitungan yang kadang keliru akibat pembayaran utang pihak ketiga yang terlambat.”

9. Kebijakan apa yang dilakukan agar penerapan SAP berbasis Akrual berjalan sesuai dengan semestinya?

Jawaban: “Senantiasa menerapkan SAP Berbasis Akrual, sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.”

10. Apakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan SAP berbasis akrual dan pertanggungjawaban laporan keuangan telah memadai?

Jawaban: “Ya cukup memadai”

11. Apakah SAP berbasis Akrual menyebabkan ketidakpastian dan menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan organisasi?

Jawaban: “Tidak ada.”

C. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

12. Apa manfaat/perkembangan yang dapat diperoleh terhadap penerapan SAP berbasis Akrual ini?

Jawaban: “Memberikan kami gambaran riil dari kondisi keuangan satker sehingga dapat lebih baik lagi dalam pelaksanaan anggaran kedepannya.”

13. Upaya-upaya apa yang bapak lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan penerapan SAP berbasis akrual tersebut ?

Jawaban:

- 1) Melakukan pencatatan/perekaman transaksi yang telah dilakukan/akan dilakukan
- 2) Memperbaiki pencatatan agar terdapat kesesuaian antara kondisi yang tercatat dengan kondisi sebenarnya

3) Melakukan pemeriksaan rutin atas laporan keuangan bulanan satker sehingga kualitas dari penerapan SAP tetap terjaga

14. Apakah penerapan SAP berbasis akrual pada BPS telah melakukan pelaporan keuangan secara penuh?

Jawaban: “Ya, dalam menyusun laporan keuangan, kami senantiasa menyajikan laporan keuangan dengan berdoman pada PSAP 01 hingga PSAP 12”

15. Apakah penerapan SAP pada BPS ini, telah memenuhi prinsip keadilan, tanggung jawab, serta kejujuran?

Jawaban: “Ya, dalam laporan keuangan tentunya kami mencatat sesuai dengan yang sebenarnya, dan senantiasa menerapkan prinsip keadilan, tanggung jawab, serta kejujuran.”

16. apakah laporan keuangan dipublikasi untuk semua orang?

Jawaban: “iya, untuk laporan keuangan kami, publikasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk buku laporan keuangan, maupun dalam bentuk soft file.”

17. Apakah dengan penerapan SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan relevan?

Jawaban: “Ya”

18. Surat keterangan wawancara

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suparno pani, SE.
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : Jl. Jendral sudirman
Jabatan : kepala Bps parepare


Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : R E S K I
Nim : 19.2800.049
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul penelitian : Penerapan standar akuntansi pemerintahan di badan pusat statistik parepare (analisis akuntansi syariah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 November 2023

Responden


(.....)

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabriah Amir
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Jendral Sudirman
Jabatan : Kasubag umum

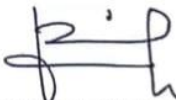
Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : RESKI
Nim : 19.2800.049
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul penelitian : Penerapan standar akuntansi pemerintahan di badan pusat statistik parepare (analisis akuntansi syariah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 November 2023

Responden


(.....)

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Filrah Amalia Murdin
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Marham Alam Raya
Jabatan : Pranata Keuangan APBN Terampil

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : RESKI
Nim : 19.2800.049
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul penelitian : Penerapan standar akuntansi pemerintahan di badan pusat statistik parepare (analisis akuntansi syariah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 November 2023

Responden


(.....)

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajrin Thamrin
Jenis kelamin : Laki - laki
Alamat : Jl. kampung baru labempa
Jabatan : Bendahara pengeluaran

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : R E S K I
Nim : 19.2800.049
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul penelitian : Penerapan standar akuntansi pemerintahan di badan pusat statistik parepare (analisis akuntansi syariah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 November 2023

Responden

(Fajrin Thamrin P.)

6. Gambaran umum Badan Pusat Statistik Parepare



7. Laporan keuangan Badan Pusat Statistik Parepare



Laporan Keuangan

BPS Kota Pare-Pare

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember
2022**

BPS Kota Pare-Pare

**Jl. Jenderal Sudirman No.66, Cappa Galung,
Kec. Bacukiki Bar., Kota Parepare, Sulawesi
Selatan 91121**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPS Kota Pare-Pare
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022		% terhadap Anggaran	31 Desember 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.299.000	32.492.953	984,93	3.298.968
JUMLAH PENDAPATAN		3.299.000	32.492.953	984,93	3.298.968
Belanja Negara	B.2	7.485.502.000	7.439.411.866	99,38	3.427.551.010
Belanja Pegawai	B.3	2.273.287.000	2.242.471.320	98,64	1.977.917.010
Belanja Barang	B.4	5.212.215.000	5.196.940.546	99,71	1.353.940.500
Belanja Modal	B.5	0	0	0,00	95.693.500
JUMLAH BELANJA		7.485.502.000	7.439.411.866	99,38	3.427.551.010

II. NERACA

BPS Kota Pare-Pare
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	11.219.178	0
Persediaan	C.2	121.033.973	63.865.188
Jumlah Aset Lancar		132.253.151	63.865.188
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.3	1.792.687.000	1.792.687.000
Peralatan Dan Mesin	C.4	1.711.686.254	1.691.236.254
Gedung Dan Bangunan	C.5	2.708.554.000	2.708.554.000
Aset Tetap Lainnya	C.6	36.121.448	32.112.984
Akumulasi Penyusutan	C.7	(1.874.928.248)	(1.681.785.798)
Jumlah Aset Tetap		4.374.120.454	4.542.804.440
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	12.850.000	12.850.000
Aset Lain-lain	C.9	1.606.290	1.556.290
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.10	(12.800.040)	(9.587.540)
Jumlah Aset Lainnya		1.656.250	4.818.750
JUMLAH ASET		4.508.029.855	4.611.488.378
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	82.777.361	80.412.717
JUMLAH KEWAJIBAN		82.777.361	80.412.717
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	4.425.252.494	4.531.075.661
JUMLAH EKUITAS		4.425.252.494	4.531.075.661
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.508.029.855	4.611.488.378

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPS Kota Pare-Pare
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	2.252.953	3.298.968
JUMLAH PENDAPATAN		2.252.953	3.298.968
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.243.173.574	1.981.465.325
Beban Persediaan	D.3	102.318.319	86.588.920
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.519.087.330	1.093.530.724
Beban Pemeliharaan	D.5	118.396.085	96.286.798
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.420.810.079	131.044.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	196.354.950	228.225.470
JUMLAH BEBAN		7.600.140.337	3.617.141.237
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7.597.887.384)	(3.613.842.269)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	1.181.250
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		30.240.000	0
SURPLUS/DEFISIT		(7.567.647.384)	(3.615.023.519)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPS Kota Pare-Pare
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas awal	E.1	4.531.075.661	4.710.229.016
Surplus/defisit-LO	E.2	(7.567.647.384)	(3.615.023.519)
Koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas	E.3	0	970.000
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	0	970.000
Transaksi Antar Entitas	E.4	7.461.824.217	3.434.900.164
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	7.406.918.913	3.424.252.042
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	54.905.304	10.648.122
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(105.823.167)	(179.153.355)
Ekuitas Akhir	E.5	4.425.252.494	4.531.075.661



PAREPARE

8. Dokumentasi wawancara



BIODATA PENULIS



RESKI. Lahir di Lainungan, pada tanggal 13 Februari 2001. Alamat Bulu wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Syafruddin dan Ibu Rahmawati. Penulis berkebangsaan indonesia dan beragama islam. memulai pendidikannya di SDN 7 Timoreng Panua, lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Panca Rijang, lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sidrap, lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hingga pada Semester Akhir penulis menyelesaikan studi Program S1 pada tahun 2024 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi “*Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Pusat Statistik Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)*”. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan bermanfaat untuk orang banyak.